

**KONTRIBUSI PEMIKIRAN MOHAMMAD NATSIR
DALAM PENGEMBANGAN IDEOLOGI
PARTAI BULAN BINTANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Hukum Islam**



Oleh:

Nadhif Muhammad Irsyad
122211012

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Drs. B. Eman Sulaeman, M.H

Tugurejo A.3 RT 2 RW 1
Tugu, Semarang

Dr. H. Mashudi, M.Ag

Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon
RT 5/1 Jepara

Semarang, 2 Juni 2016

Nota pembimbing

Lamp. : 4 (Empat) Eksemplar

Hal. : Naskah Skripsi

a.n. Saudara Nadhif Muhammad Irsyad

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nadhif Muhammad Irsyad

NIM : 122211012

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul Skripsi : "Kontribusi Pemikiran Mohammad Natsir dalam Pengembangan Ideologi Partai Bulan Bintang"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs. B. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 19650605 199203 1 003



Pembimbing II

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 19671113 200501 1001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Nadhif Muhammad Irsyad**
NIM : 122211012
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **KONTRIBUSI PEMIKIRAN MOHAMMAD NATSIR
DALAM PENGEMBANGAN IDEOLOGI PARTAI BULAN
BINTANG**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **lulus**, dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal : 14 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 14 Juni 2016

Ketua Sidang

Drs. Miftah AF, M. Ag.
NIP. 19530515 198403 1 001

Setretaris Sidang

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 19650605 199203 1 003

Penguji I

Drs. H. Nur Svamsuddin, M. Ag.
NIP. 19680505 199503 1 002

Penguji II

Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, MSl.
NIP. 19520805 198303 1 002

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II

Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 196901221 200501 1 002



MOTTO

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"
Q.S. al-Baqarah – 282

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan penulis serta usaha keras yang terbalut dengan suka maupun duka turut mewarnai dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan ketulusan hati ku persembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungannya untukku.

Special thanks to:

Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Jumari dan Ibu Satini)
Kakakku (Zahrotun Naimah, S. HI)
Bu Lek (Sutri)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Juni 2016

Deklarator,



Nadhif Muhammad Irsyad

122211012

ABSTRAK

Partai Bulan Bintang atau yang sering disebut dengan PBB merupakan partai politik di Indonesia yang berasaskan Islam. PBB didirikan dengan dilandasi niat membangun bangsa dan negara bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan suku, asal-usul keturunan, agama, maupun golongan, serta prinsip bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Simbol bulan bintang di masa lalu pernah digunakan partai Masyumi, yang menjadi sarana dakwah sekaligus politik Mohammad Natsir dalam memperjuangkan prinsip-prinsip ajaran Islam agar dimasukkan ke dalam konstitusi Indonesia.

Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti mencoba mengkaji bagaimanakah gagasan Mohammad Natsir tentang Islam politik, serta kontribusi pemikirannya di dalam ideologi PBB itu sendiri, dalam skripsi yang berjudul “Kontribusi Pemikiran Mohammad Natsir dalam Pengembangan Ideologi PBB”.

Adapun masalah yang hendak dijawab melalui penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pokok-pokok pemikiran Mohammad Natsir tentang ideologi partai politik Islam? (2) Bagaimana kontribusi pemikiran Mohammad Natsir dalam ideologi partai politik Islam bagi pengembangan PBB?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pustaka (*library research*), yang mana lebih mengutamakan bahan perpustakaan sebagai sumber utamanya. Dalam hal ini peneliti mengambil sumber data di situs resmi partai melalui Internet dan buku karangan Natsir “Islam sebagai Dasar Negara”, serta buku-buku lain yang ada relevansinya tentang Islam politik. Metode analisis yang digunakan adalah analisis historis. Analisis historis merupakan deskripsi yang terpadu dari keadaan-keadaan, sejarah pemikiran, atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian serta studi yang kritis untuk mencari kebenaran.

Islam sangat fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman selama prinsip-prinsip pemikiran dalam Islam tetap dipertahankan. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, apabila tidak menerapkan hukum Islam maka merugikan umat Islam itu sendiri. Karena Islam adalah ajaran yang universal. Dalam menerapkan syari’at Islam di negeri ini diperlukan seorang pemimpin

yang Muslim. PBB yang menganggap dirinya penerus dari Masyumi, dalam hal ini benar-benar memperjuangkan agar nilai-nilai Islam masuk di dalam konstitusi Indonesia. Dalam Sidang Tahunan (ST) MPR tahun 2000, partai ini mengusulkan agar Piagam Jakarta dimasukkan kembali dalam Mukadimah UUD 1945. Sesuai dengan visi partai itu sendiri, yakni terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan segala kasih dan sayang-Nya bagi kita semua, khususnya bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Kontribusi Pemikiran Mohammad Natsir dalam Pengembangan Ideologi Partai Bulan Bintang”** ini disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Karya skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa kritik, saran, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari pengajuan judul sampai terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M. H. dan Bapak Dr. H. Mashudi, M. Ag., selaku Pembimbing I dan II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam pelaksanaan penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Rokhmadi, M. Ag. dan Bapak Rustam DKAH, M. Ag. selaku Kepala Jurusan dan Sekertaris Jurusan di Jurusan

Hukum Pidana Islam, anda semua orang-orang yang sangat berjasa atas terselesaikannya pendidikan ini.

3. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Muhibbin, MA. Yang telah memberikan tauladan, utamanya di saat penulis masih aktif sebagai aktivis mahasiswa.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan.
6. Orang tua atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral maupun material yang tidak mungkin terbalas.
7. Kakak saya Zahrotun Naimah, S.HI, yang selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Anggota SEMA-U periode 2015-2016. Terimakasih atas kerja samanya dan tetap semangat.
9. Teman-teman kader PRMN (Partai Revolusi Mahasiswa Nasionalis), teruntuk Mas Edi Sembiring dan Zamroni, yang telah mendorongku untuk berani menjadi oposisi dalam Pemiluwa 2014.
10. Teman-teman kelas SJB 2012, (Alam, Zamroni, Nizar, Arif, Ervan, Zain, Kholik, Adam, Chabib, Novan, Adi, Mukhlisin, Islah, Muhib, Us, Ninik, Hikmah, Mila, Windu, Ana, Ning,

Aida) terimakasih telah mengukir kebersamaan dan menjadi teman terindah.

11. Teman-temanku seperjuangan di YPMI al-Firdaus (Ulil, Alam, Khoiri, Bagus, Zaky, Luthfi, Toni, Aziz) terimakasih telah menjadi keluarga kedua di Semarang.
12. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Semarang, 6 Juni 2016
Penyusun,

Nadhif Muhammad Irsyad
122211012

	B. Platform PBB	57
	C. Peran PBB dalam Pemilihan Umum	60
BAB IV	ANALISIS PEMIKIRAN MOHAMMAD NATSIR TENTANG PARTAI POLITIK ISLAM DALAM IDEOLOGI PBB	
	A. Pokok Pemikiran Mohammad Natsir dalam Politik Partai Islam.....	64
	B. Kontribusi Pemikiran Mohammad Natsir tentang Ideologi Partai Politik Islam dalam Pengembangan Ideologi PBB	70
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran	81
	C. Penutup	82
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Pancasila dijadikan dasar ideologi formal Republik Indonesia pada tahun 1945 oleh Soekarno, Pancasila menjadi bagian perdebatan politik yang tak terelakan oleh Politikus dan Agamawan, khususnya Islam. Piagam Jakarta yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberlakukan syari'at Islam, dengan tidak ada maksud untuk menyingkirkan ajaran penganut agama-agama lain di negeri ini serta golongan Islam memberi jaminan kebebasan dalam hidup ternyata gagal diperjuangkan. Kemudian golongan Islam mulai memikirkan suatu partai politik yang dapat menjadi payung bagi semua organisasi Islam pada saat itu.¹Pada tahun 1950-1955 lahirlah sistem multipartai, ini merupakan kesempatan besar bagi partai Islam untuk memperjuangkan Islam sebagai asas negara, akan tetapi apa yang dicita-citakannya masih belum bisa dicapai sampai sekarang.

Dengan kedatangan dan tampil rezim Orde Baru di panggung kekuasaan mengiringi kegagalan kudeta PKI pada tahun 1956, harapan dan optimisme tinggi menyeruak di kalangan banyak pemimpin dan para aktivis Islam. Hal ini tercermin pada para mantan pemimpin Masyumi beserta

¹ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 158.

konstituennya yang secara politis telah ditindas pada masa Demokrasi Terpimpin. Karena menjadi bagian penting dari kekuatan-kekuatan koalisi yang telah meruntuhkan partai komunis dan rezim Soekarno, mereka mengantisipasi kembalinya Islam dalam percaturan politik nasional. Rezim Orde Baru memulai dengan membebaskan para mantan tokoh Masyumi, termasuk Mohammad Natsir, Kasman Singodimejo, Prawoto Mangkusasmito, dan Hamka.²

Selepas Soeharto, Indonesia memasuki fase baru: “liberalisasi politik”. Yang mencolok mata di fase ini adalah tuntutan berbagai kalangan, termasuk kalangan umat Islam agar hak-hak politiknya dipulihkan dan dikembalikan. Semua kelompok masyarakat yang selama ini terpasung aspirasinya, ramai-ramai mendirikan wadah penyaluran aspirasi politik. Tak terkecuali, banyaknya pendirian partai-partai yang berlandaskan Islam. Dengan terbentuknya 83 partai politik yang didalamnya 10 partai berlabelkan Islam, tidak berlebihan jika suara umat Islam diperhitungkan dalam pemilu bagi masing-masing partai peserta politik kala itu. Hal ini penting untuk dipertegas, karena setelah berlangsung beberapa kali pemilu pada masa rezim otoriter Orde Baru selalu saja penggunaan hak pilih umat tidak termanajemenkan secara maksimal atau katakanlah dimanipulasi, bahkan terkesan sering dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan

² Nanang Tahqiq (ed), *Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 96.

politik lain yang kepentingannya tidak langsung kepada kepentingan umat, sehingga dalam kenyataannya politik kepentingan umat senantiasa terpinggirkan.³

Partai Bulan Bintang yang dipimpin oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dalam deklarasinya menyebutkan bahwa Partai Bulan Bintang didirikan dengan dilandasi niat membangun bangsa dan negara bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan suku, asal-usul keturunan, agama, maupun golongan, sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, serta prinsip bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam.⁴

Allah SWT. berfirman dalam surat al-Anbiya' ayat 107 sebagai berikut:

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.*⁵

Setiap ucapan, pemikiran dan tindakan warga partai senantiasa berlandaskan kepada ajaran Islam yang melampaui ruang dan waktu. Ajaran Islam merupakan sumber inspirasi, motivasi, hukum dan pandangan hidup dalam arti sesungguhnya.

³*Ibid.*

⁴Musa Kazhim et al.5 *Partai Dalam Timbangan*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999, hlm. 128.

⁵Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama, *Mushaf al-Muntaaz*, Jakarta: Mumtaaz Media Islami, 2007, hlm. 331.

Bagi warga bulan bintang cahaya iman akan memancarkan *ukhuwah Islamiyah* dan menyuburkan *shilaturrahim* dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

Partai yang berlambang bulan dan bintang ini adalah untuk menggambarkan kesinambungan historis perjuangan Islam sejak berabad-abad lampau, sejak kaum Muslimin mulai tumbuh dan berkembang di masyarakat kita, kemudian berjuang mendirikan kesultanan-kesultanan Muslim, bertempur melawan penjajah, dan akhirnya bahu-membahu dengan segala komponen kekuatan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, dilanjutkan dengan perjuangan politik setelah Indonesia merdeka, sampai pada sekarang ini.⁷

Simbol bulan bintang di masa lalu pernah digunakan partai Masyumi, partai politik umat Islam yang semula dimaksudkan akan menjadi satu-satunya partai politik Islam di Indonesia, ketika partai politik ini diumumkan berdirinya pada awal November 1945. Mohammad Natsir merupakan pemimpin partai Masyumi terlama yang menjadikan partai ini sarana untuk berdakwah dalam memperjuangkan gagasan-gagasannya tentang Islam sebagai dasar negara Indonesia. Natsir beranggapan bahwa urusan agama dan negara tidak dapat dipisah, karena agama telah

⁶ Tafsir Asas Partai Bulan Bintang dikutip dari www.bulan-bintang.org/page/tafsirasas.. pada tanggal 8 Februari 2016, hlm. 4.

⁷ Musa Kazhim & Alfian Hamzah., *Op.Cit*, hlm. 107.

menjadi bagian dari sistem sosial dan budaya masyarakat. Dalam menegakkan syari'at Islam di negara yang penduduknya mayoritas Muslim tidak salah jika Natsir berupaya untuk memperjuangkannya, dengan tetap meyakinkan akan jaminan kebebasan beribadah terhadap pengikut agama lain dan memperjuangkan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

PBB awal berdirinya mendapat dukungan beberapa ormas Islam, salah satunya yakni Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), dimana DDII ini didirikan oleh Natsir saat Orde Baru yang di dalamnya juga banyak terdapat mantan tokoh-tokoh Masyumi. Sementara harapan dibalik berdirinya Partai Bulan Bintang di maksudkan sebagai wahana untuk masuk ke dalam struktur kekuasaan politik, dengan cita-cita menjadikan masyarakat Indonesia yang Islami. Dengan menggunakan simbol bulan bintang inilah, sehingga tidak perlu lagi mensosialisasikan ke tengah masyarakat.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, peneliti hendak melakukan penelitian dengan judul "Kontribusi Pemikiran Mohammad Natsir dalam Pengembangan Ideologi Partai Bulan Bintang".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pokok-pokok pemikiran Mohammad Natsir tentang ideologi partai politik Islam?
2. Bagaimana kontribusi pemikiran Mohammad Natsir dalam ideologi partai politik Islam bagi pengembangan Partai Bulan Bintang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pokok-pokok pemikiran Mohammad Natsir tentang ideologi partai politik Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi pemikiran Mohammad Natsir tentang ideologi partai politik Islam bagi pengembangan Partai Bulan Bintang.

Sedangkan manfaat dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Manfaat *akademis*, yakni dapat dijadikan sebagai upaya pengembangan keilmuan dalam bidang politik tentang sebuah partai Islam yang bercita-cita menjalankan demokrasi berlandaskan nilai Islam.

2. Manfaat *praktis*, yakni dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya umat Islam mengenai pentingnya menjunjung tinggi partai Islam dalam menerapkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat mayoritas Islam, dengan tetap menjamin kebebasan beragama bagi saudara kita non muslim.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, peneliti berusaha melakukan kajian awal terhadap pustaka yakni karya-karya yang berkaitan dengan topik yang ingin diteliti. Selain itu telaah pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Yang terpenting dalam telaah ini adalah peneliti dapat memposisikan penelitian yang akan dilakukan terhadap penelitian-penelitian yang telah mendahului agar terhindar dari duplikasi penelitian.

Dalam skripsinya Achmad Syukron berjudul *Pandangan Mohammad Natsir Tentang Demokrasi dan Kontribusinya*

Terhadap Dinamika Politik Partai Masyumi,⁸ menjelaskan bahwa di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, Mohammad Natsir memperkenalkan pemikiran demokrasi yang berasas *diniyah* (beragama) dan *la diniyah* (tanpa agama). Dalam hal ini, penyusun lebih menitik beratkan pada pandangan tokoh tentang demokrasi dan partai Masyumi, namun tidak membahas tentang dampak dibubarkan/ bubarnya partai ini bagi perkembangan politik Islam di Indonesia.

Sementara dalam skripsi Abdul Aziz yang berjudul *Perjuangan Partai Bulan Bintang dalam Penegakkan Syari'at Islam di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah*,⁹ menjelaskan PBB beranggapan bahwa urusan agama dan negara tidak dapat dipisah karena keduanya saling membutuhkan dan melengkapi. PBB juga berupaya dalam penegakkan syari'at Islam dengan tujuan menghapus perundang-undangan dan peraturan yang bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam skripsi di atas tidak menyinggung peran PBB dalam pemilihan umum, bagaimanapun juga partai ini saat awal berdirinya sangat diperhitungkan.

Dalam tesisnya Ahmad Syafi'i Ma'arif yang dibukukan dengan judul *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa*

⁸ Achmad Syukron, *Pandangan Muhammad Natsir Tentang Demokrasi dan Kontribusinya Terhadap Dinamika Politik Partai Masyumi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2005.

⁹ Abdul Aziz, *Perjuangan Partai Bulan Bintang dalam Penegakkan Syari'at Islam di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah*, dikutip dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1840> pada tanggal 22 April 2016.

Demokrasi Terpimpin (1959-1965).¹⁰ Karya ini meneliti tentang relasi Islam dan politik yang kemudian menggambarkan perilaku partai-partai Islam dalam menghadapi kebijakan politik Soekarno saat itu, khususnya partai Masyumi yang dibubarkannya. Di sini penyusun memang memfokuskan pada gerakan partai politiknya, namun tidak dijelaskan secara rinci seperti apa kriteria ideologi partai politik yang Islami.

Dari rentetan judul skripsi dan tesis diatas tidak terdapat penjelasan atau telaah atas pokok-pokok pemikiran Mohammad Natsir dalam pengembangan ideologi PBB. Karenanya kajian dan penelitian tentang kontribusi pemikiran Mohammad Natsir dalam ideologi PBB sejauh pelacakan peneliti bukan merupakan duplikasi dari riset-riset sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini layak diajukan dan dilanjutkan dan dapat menghindari praktik duplikasi sebagai salah satu syarat sebuah penelitian yang valid dan sah.

E. Metode Penelitian

Dalam sub bab ini perlu penyusun paparkan tentang metode penelitian yang digunakan. Antara lain meliputi jenis penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, pendekatan-pendekatannya dan analisa data.

¹⁰Ahmad Syaf'i Ma'arif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yang mana lebih mengutamakan bahan perpustakaan sebagai sumber utamanya. Sumber ini meliputi bacaan-bacaan tentang teori, penelitian, dan bermacam jenis dokumen.¹¹

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan sosio-historis. Yang dimaksud pendekatan normatif ialah suatu pendekatan untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum (*fiqih*) yang berlaku sebagai upaya penegasan. Hal ini penting untuk dilakukan karena politik Islam merupakan bagian dari kajian hukum Islam, terkhusus *Fiqih Siyash*.

Adapun pendekatan sosio-historis yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa setiap produk pemikiran itu merupakan hasil interaksi pemikir dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang mengitarinya. Berkaitan dengan penelitian ini sudah barang tentu sosial politik dan kultur yang melatarbelakangi berdirinya Partai Bulan Bintang.

¹¹ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 31.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua macam yaitu: data primer dan data sekunder. Dalam mengkaji Partai Bulan Bintang, peneliti mengambil sumber data di situs resmi PBB melalui Internet dan buku Mohammad Natsir yang berjudul *Islam Sebagai Dasar Negara*, serta buku-buku karangan lainnya.

Sementara data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian adalah data tertulis berupa buku-buku, artikel-artikel karya ilmiah yang dimuat dalam media massa, dan tulisan-tulisan yang dibukukan yang ada relevansinya dengan politik Islam Mohammad Natsir dan Partai Bulan Bintang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan metode dokumentasi.

Studi dokumentasi adalah salah satu cara metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang

bersangkutan.¹² Tugas utama adalah mencari lokasi atau akses ke materi atau, sebagaimana dalam kasus media massa, memutuskan apa yang akan diteliti dari rentangan luas materi yang tersedia.¹³ Dalam hal ini, yang menjadi objek peneliti adalah Partai Bulan Bintang mulai dari latar belakang berdirinya partai, sampai dengan perjalanan partai dari awal hingga sekarang. Serta pokok-pokok pemikiran Mohammad Natsir tentang Islam politik dalam pengembangan ideologi PBB.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul penyusun akan menganalisa dengan metode analisis historis. Analisis historis merupakan deskripsi yang terpadu dari keadaan-keadaan, sejarah pemikiran, atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian serta studi yang kritis untuk mencari kebenaran.¹⁴ Dalam hal ini analisa dari gagasan politik Mohammad Natsir tentang ideologi partai Islam dalam memperjuangkan syariat Islam masuk dalam konstitusi negara Indonesia dan bagaimana kontribusinya

¹² Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, hlm. 143.

¹³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 76.

¹⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet.Ke-10, 2014, hlm. 36.

dalam pengembangan ideologi Partai Bulan Bintang dalam menghadapi politik masa kini.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini akan di bagi menjadi lima bab yang masing-masing bab akan terdiri dari sub bab. Hal tersebut bertujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan dan pemahaman. Untuk itu perlu kiranya penulis menuangkan sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua berbicara deskripsi singkat tokoh Mohammad Natsir, mulai dari karier dan perjuangan politik, perjalanannya bersama Masyumi, pemikirannya tentang konsep negara, serta karya-karyanya.

Bab ketiga memuat gambaran umum tentang Partai Bulan Bintang, mulai dari latar belakang berdirinya partai, platform partai, serta peran partai dalam pemilihan umum.

Bab keempat berisi tentang analisis pokok-pokok pemikiran Mohammad Natsir tentang ideologi partai Islam dan kontribusi pemikirannya tentang ideologi partai politik Islam bagi pengembangan Partai Bulan Bintang.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dan penutup.

BAB II

CORAK PEMIKIRAN MOHAMMAD NATSIR DAN HAL-HAL YANG MELATARBELAKANGINYA

A. Karier dan Perjuangan Politik

Memahami sosok dan pemikiran Mohammad Natsir memang menarik. Ia adalah seorang negarawan besar yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tokoh ini telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk bangsa Indonesia dan umat Islam dunia. Perjuangannya dalam menentukan perjalanan sejarah Indonesia, maupun kiprahnya pada dunia Islam, telah menjadikannya sebagai seorang ulama sekaligus negarawan yang disegani. Mohammad Natsir dilahirkan di sebuah kota sejuk, Alahan Panjang, Sumatera Barat, sebuah daerah yang memiliki etnis budaya yang unik dan menonjol dalam khazanah kebudayaan di Indonesia. Di daerah ini juga telah lahir sederetan nama tokoh yang pernah mewarnai elite bangsa Indonesia. Baik di bidang agama, politik maupun sastra dan budaya. Bahkan dari sepuluh tokoh Indonesia yang berperan penting dalam kelahiran bangsa Indonesia, diantaranya dari Minangkabau. Itulah sebabnya, banyak sejarawan menilai, bahwa Republik dan orang Minangkabau adalah dua hal yang sulit dipisahkan.¹

¹Kholid O. Santosa, "Pengantar: Mohammad Natsir Sang Pilar Demokrasi", dalam Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, Bandung: Segi Arsy, 2014, hlm. 12.

Mohammad Natsir lahir pada hari Jum'at 17 Jumadil Akhir 1326 Hijriah bertepatan dengan 17 Juli 1908 Masehi, dari pasangan Sutan Saripado dan Khadijah sebagai anak ketiga dari empat bersaudara. Tiga saudaranya yang semuanya merupakan saudara perempuan masing-masing bernama Yukinan dan Rubiah yang merupakan saudara tua (kakak) serta Yohanusun, saudara muda (adik). Riwayat pendidikan Mohammad Natsir dimulai di sekolah Rakyat (SR) Maninjau Sumatera Barat hingga kelas dua. Ketika ayahnya dipindah tugaskan ke Baharu, Natsir mendapat tawaran dari mamaknya, Ibrahim untuk pindah ke Padang agar dapat menjadi siswa di Holland Indlans School (HIS) Padang. Namun HIS menolaknya dikarenakan latar belakang Mohammad Natsir yang berasal dari anak pegawai rendahan. Natsir kemudian memasuki HIS Adabiyah (swasta) yang diperuntukkan anak-anak negeri. Hanya selama lima bulan ia menjalani pendidikan di sekolah ini, karena ayahnya kembali dipindah tugaskan ke Alahan Panjang. Masa-masa inilah Natsir mulai belajar hidup berpisah dengan orang tua. Ia menjalani pendidikan di sekolah HIS Pemerintah yang berada di kota Solok, yang cukup jauh dari Alahan Panjang. Natsir dititipkan di rumah saudagar yang bernama Haji Musa.²

²*Ibid.*, hlm. 13.

Selain belajar di HIS pada pagi hari, Natsir juga belajar di sekolah Diniyah pada sore hari dan belajar mengaji pada malam hari. Natsir juga mulai mempelajari bahasa Arab. Pada waktu itulah Natsir mulai menunjukkan bakatnya sebagai seorang pendidik, saat ia duduk di kelas tiga ia sudah diminta untuk mengajar di kelas satu. Sebagai imbalan atas tugasnya itu, Natsir memperoleh honorarium sebesar sepuluh ribu rupiah sebulan.

Menginjak usia muda, Natsir merupakan aktivis JIB (*Jong Islamietien Bond*, Serikat Pemuda Islam), terutama sebagai anggota lembaga inti organisasi tersebut, Natsir aktif pula memberikan pelajaran tentang agama Islam kepada pelajar Sekolah Menengah, di antaranya pada pelajar MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*), setingkat dengan SMP sekarang di jalan Jawa, Bandung. Natsir menjadi ketua JIB cabang Bandung dari tahun 1928-1932. Selain itu terhadap kegiatan organisasi sehari-hari, perhatiannya tertuju terutama kepada usaha meningkatkan pengenalan dan pengetahuan para anggota organisasi tersebut tentang agama Islam yang secara formal dipeluknya. Kesadaran tentang pentingnya usaha demikian timbul setelah dia sendiri menyaksikan betapa tipisnya pengetahuan kawan-kawannya sekolah tentang agama Islam.³

³Ajip Rosidi. "Pendahuluan", dalam Mohammad Natsir, *Kebudayaan Islam dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: Girimukti Pasaka, 1988.

Natsir terlibat dalam penerbitan majalah *Pembela Islam* sejak awal, yang nomor pertamanya terbit bulan Oktober 1929, tatkala itu ia masih duduk di AMS (*Algemene Middelbare School*). Meski namanya tidak termasuk pengurus Komite Pembela Islam yang secara formal mengemudikan majalah tersebut, namun sumbangannya terhadap majalah itu tidaklah hanya karangan-karangan yang umumnya tidak memakai nama sama sekali atau kalaupun memakai nama hanya inisial atau nama samaran belaka.⁴

Disamping kontribusinya di bidang pendidikan, terutama dalam memberi ruh agama terhadap sistem pendidikan di Indonesia, Natsir juga dicatat sebagai tokoh yang menorehkan jejak-jejak politik yang penting dalam sejarah Indonesia. Karier politiknya semakin cemerlang ketika ia menduduki jabatan Menteri Penerangan, dalam Kabinet Sjahrir I. Dengan jabatan ini Natsir merupakan Menteri Penerangan pertama dalam sejarah kabinet di Indonesia. Namun jabatan itu kembali ia tempati pada kabinet Hatta dan Kabinet Sjahrir II. Selama menjabat menteri penerangan itu ia selalu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyusun naskah pidato, dan naskah lain yang menyangkut kebijakan, keputusan atau intruksi Presiden. Hingga pernah

⁴*Ibid.*

terjadi, ketika Soekarno tidak mau menandatangani suatu naskah yang tidak ditulis oleh Natsir.

Pada tanggal 29 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan RIS, kecuali Irian Barat. Dalam RIS, tergabunglah 16 Negara Bagian, termasuk Republik Indonesia di Yogyakarta. Karena Irian tidak termasuk yang diserahkan, maka Natsir yang saat itu menjabat sebagai Menteri Penerangan, bersama Menteri Luar Negeri H. Agus Salim, menolak KMB dan tidak mau masuk kabinet RIS. Natsir kemudian berkonsentrasi memimpin Fraksi Masyumi di Parlemen RIS.

Sebagai Ketua Fraksi Masyumi, Natsir mencermati keadaan yang berkembang, bisa berakibat tidak baik untuk negara yang baru merdeka ini.⁵Natsir kemudian menemui Ketua Fraksi mengadakan diskusi dengan para pemimpin fraksi, dari yang paling kiri seperti Ir. Sakirman dari Partai Komunis Indonesia (PKI), yang fraksi sangat kanan, seperti Sahetapy Engel dari *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO). Hasil diskusi itu, Natsir menyimpulkan bahwa negara-negara bagian itu mau membubarkan diri untuk bersatu dengan Republik Indonesia di Yogyakarta. Sepanjang dua setengah bulan, Natsir melakukan lobi yang diakuinya tidak mudah, terlebih-lebih dengan negara-negara bagian di luar Jawa seperti negara bagian di Sumatera dan

⁵ Mohammad Natsir, *Op.Cit.*, hlm. 20.

Madura. Setelah semuanya dirasa mantap, Natsir mengajukan Mosi Integral. Tidak berlebihan jika kita katakan bahwa Mosi Integral Natsir merupakan prestasi gemilang dan monumental yang pernah dicapai oleh parlemen Indonesia. Dalam kehidupan politik, kita dapat meneladani pemikiran, sikap, dan tindakan Natsir sebagai seorang demokrat. Dalam sistem multipartai yang ada pada saat itu, ketika Pak Natsir menjadi Perdana Menteri, sikap-sikap seorang demokrat dan negarawan di kedepankan, untuk menjaga keutuhan dan persatuan. Sejarah kemudian mencatat, bahwa jatuh banggunya pemerintahan pada saat usia pemerintahan masih sangat muda, telah mengajarkan kepada kita, tentang pentingnya kearifan, norma, etika, dan moral yang tinggi dalam berpolitik. Sesungguhnya, dalam era keterbukaan dan demokrasi sekarang ini, kita selayaknya juga menampilkan sikap politik yang saling menghormati dan saling menghargai, sebagaimana dicontohkan oleh Mohammad Natsir.⁶

Kalau kita ikuti lagi riwayat Pak Natsir kenapa dia menjadi “pemberontak” atau kemudian diwaktu Orde Baru termasuk orang yang disingkirkan, selalu masalahnya adalah pemahaman tentang konstitusi. Pemilihan umum pada tahun 1955 yang sampai sekarang dianggap sebagai pemilihan umum yang

⁶ Kata Pengantar Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. “Memetik Keteladanan, Keikhlasan, dan Semangat Juang Pak Natsir” dalam Lukman Hakiem (ed), *M. Natsir di Panggung Sejarah Republik*, Jakarta : Panitia Peringatan Refleksi Seabad M. Natsir, 2008.

paling berhasil, relatif jauh bersih apalagi dengan pemilu pada waktu Orde Baru, dengan partisipasi rakyat yang sangat hebat. Pemilu 1955 menghasilkan konstalasi kepartaian yang canggih. Ada 15 wilayah daerah pemilihan, Masyumi tampil sebagai pemenang di dua belas daerah pemilihan dan di setiap daerah pemilihan, Masyumi mendapatkan kursi.

Itulah jejak politik seorang negarawan besar yang memberikan hidupnya untuk kemajuan bangsa dan rakyatnya. Hingga medio 1993, umat Islam dan bangsa Indonesia berkabung, Sang Negarawan Islam Legendaris yang telah menancapkan pilar-pilar demokrasi itu menghadap Ilahi dalam usia 85 tahun. Mohammad Natsir berpulang ke rahmatullah pada tanggal 6 Februari 1993 Masehi bertepatan dengan 14 Sya'ban 1413 Hijriah di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo Jakarta, dengan meninggalkan enam orang anak dari pernikahannya dengan Nurhanar.⁷

B. Mohammad Natsir dan Masyumi

Pendeknya usia Piagam Jakarta dalam sejarah konstitusionalisme Indonesia tidak mengendorkan semangat perjuangan politik umat Islam di alam kemerdekaan. Bila selama ini kesatuan gerak politik di kalangan organisasi dan partai-partai Islam dirasakan tidak memadai sebagai wahana perjuangan, maka

⁷Mohammad Natsir, *Op.Cit.*, hlm. 45.

dipandang sudah sangat mendesak agar umat merapatkan barisan dalam satu partai politik. Partai politik itu ialah Masyumi, tapi bukan Masyumi “*made in Japan*”, seperti yang dibentuk pada tahun 1943 atas “kebaikan” penguasa Jepang di Indonesia.⁸ Masyumi yang berdiri 7 November 1945 sepenuhnya merupakan hasil karya pemimpin-pemimpin umat Islam dalam sebuah kongres bertempat di gedung Madrasah Mu’alimîn Muhammadiyah, Yogyakarta. Adapun nama Masyumi tetap dipakai semata-mata hasil musyawarah bulan itu.⁹

Dilihat dari data sosiologis umat, pendukung utama partai baru ini ialah Muhammadiyah dan NU. Jadi jelas secara ideologis, Masyumi adalah kelanjutan dari MIAI, tapi kali ini mengkhususkan perjuangan di bidang politik dalam rangka menegakkan ajaran Islam dalam wadah Indonesia merdeka. Selain Muhammadiyah dan NU, hampir semua organisasi Islam lokal maupun nasional mendukungnya. Masyumi kemudian tampil sebagai pembela demokrasi yang tangguh dalam negara republik Indonesia.

Pada kongres November itu, tercatat sebagai ketua panitia ialah Mohammad Natsir dengan anggota-anggota: Soekiman Wirjosendjojo, Abikusno Tjokrosujoso, A. Wahid

⁸Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Op.Cit.*, hlm. 31.

⁹Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta: Grafiti Pers, 1987, hlm. 47.

Hasyim, Wali al-Fatah, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sri Paku Alam VIII, dan A. Gaffar Ismail. Dalam kongres diputuskan bahwa: (1) Masyumi adalah satu-satunya partai Islam di Indonesia; (2) Masyumi-lah yang akan memperjuangkan nasib (politik) umat Islam Indonesia. Dengan ikrar ini, berarti eksistensi partai Islam yang lain tidak di akui lagi. Pengurus Masyumi periode awal terdiri dari Majelis Syura yang diketuai oleh KH Hasyim Asy'ari, dan Pengurus Besar (Badan Eksekutif) yang diketuai oleh Soekiman Wirjosendjojo. Mohammad Natsir sendiri pada periode awal itu merupakan anggota Pengurus Besar.¹⁰

Partai Masyumi dalam tempo singkat telah muncul sebagai partai yang sangat mengakar dalam masyarakat Indonesia. Ulama dan para pemimpin politik Islam dari seluruh tanah air segera bergabung dengan para partai ini sekalipun banyak di antara mereka tidak dapat menghadiri kongres November lantaran sulitnya transportasi. Bila dilihat dari aliran-aliran politik sebelum Perang Dunia II yang secara kasar dapat dikelompokkan menjadi Islam, Marxisme/Komunisme, dan Nasionalisme. Maka untuk kelangsungan hidupnya diperlukan kebijakan tingkat tinggi dari para pemimpinnya yang berasal dari berbagai latar belakang sub-kultural dan paham keagamaan.

¹⁰Seri Buku Tempo. *Natsir : Politik Santun di antara Dua Rezim*, Jakarta : KPG, 2011, hlm. 75.

Seperti telah disinggung sebelumnya, pendukung inti Masyumi adalah Muhammadiyah dan NU, karena memang dua organisasi ini mempunyai massa terbesar bila di bandingkan organisasi-organisasi Islam lain. Berdasarkan kenyataan ini, dapat di bayangkan bilamana satu dari diantara kedua pendukung ini mengundurkan diri dari Masyumi, maka partai ini akan kehilangan salah satu sayap (pesantren atau reformis) dari tubuhnya.¹¹

Sebagai representasi politik umat, Masyumi hampir mewarnai di setiap problematika politik nasional. Sepanjang tahun 1945-1949, yang ditandai oleh beberapa kali pergantian kabinet, Masyumi menampakkan peran yang dinamis. Setelah kabinet presidensiil pertama diganti dengan sistem parlementer, Indonesia mengalami pergantian kabinet beberapa kali. Pada masa Kabinet Syahrir I, II, III dan Kabinet Amir Syarifuddin I, Masyumi mengambil peran oposisi kendati ada anggotanya yang menjadi tim di dalam kabinet tersebut. Sementara pada masa Kabinet Amir Syarifuddin II dan Kabinet Mohammad Hatta, Masyumi menjadi bagian dalam sistem pemerintahan.¹²

Dengan segala tempaan di masa lalunya itulah Mohammad Natsir berhasil menjadi ketua terlama Partai

¹¹*Ibid.*

¹²Abdul Aziz, *Islam Politik: Pergulatan Ideologi PPP Menjadi Partai Islam*, Tiara Wacana: Yogyakarta, 2006, hlm. 38.

Masyumi (1949-1958). Partai Islam ini juga berhasil diantarkannya memenangi posisi kedua dalam pemilihan umum 1955. Sebagai orang yang tak pernah mengenyam bangku perguruan tinggi, prestasi Natsir sungguh luar biasa. Apalagi, seperti yang diungkapkan Yusril Ihza Mahendra, salah satu anak didik Natsir, partai berlambang bulan bintang itu pernah orang berbeda aliran dan karakter politik. Menurut Yusril, elit Masyumi berasal dari alumni *Jong Islamieten Bond* dan *Islamic Studie Club*. Sebagian mereka juga pernah mendirikan Partai Sarekat Islam Indonesia pada zaman Belanda. Ciri utama mereka adalah didikan sekolah Belanda dan tertarik pada Islam. Sebagian besar mereka adalah kaum Islam Jawa, seperti Mohammad Roem dan Sukiman. Ada juga yang mulanya condong ke kiri, seperti Sjafroeddin Prawiranegara. Pada masa awal kemerdekaan,

Masyumi juga nyaris terbelah akibat perbedaan sikap menanggapi perundingan Roem-Royen. Natsir bahkan menjadi salah satu pengkritik keras Mohammad Roem karena menjadi juru runding dalam perjanjian Roem-Royen.¹³

Kekuatan dan sekaligus kelemahan Masyumi menurut suatu analisis justru terletak pada sifatnya yang federatif. Menurut A.R. Baswedan (1909-1986) salah seorang pemimpin Masyumi, mantan ketua dan pendiri PAI (Partai Arab Indonesia),

¹³Seri Buku Tempo, *Op.Cit.*, hlm. 76.

berdiri pada 1934 dengan bentuk federatif, Masyumi berhasil menarik hampir semua organisasi Islam Indonesia, sedangkan mereka tetap mempunyai otonomi dalam kegiatan sosio-keagamaan mereka. Tetapi menurut tokoh ini, kelemahan Masyumi terletak pada semangat golongan seringkali lebih dominan dalam partai ketimbang semangat persatuan. Kenyataan inilah yang sering menempatkan Masyumi pada posisi sulit dalam menyusun badan eksekutif yang kuat dan handal.

Selama empat tahun lebih, Masyumi bersama golongan lain memusatkan perhatian pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang masih dirongrong keinginan Belanda untuk meneruskan penjajahan kembali. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan baru berakhir pada Desember 1949, setelah perjanjian KMB (Konferensi Meja Bundar) ditanda-tangani oleh pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda di Den Haag. Komitmen umat Islam di bawah pimpinan Masyumi kepada perjuangan mempertahankan kemerdekaan adalah total. Bagi umat Islam, perjuangan itu merupakan jihad di jalan Allah. Ini berarti mereka, mati di dalamnya dijuluki sebagai syuhada, sebuah posisi mulia menurut ketentuan agama.¹⁴

Namun pada bulan-bulan awal tahun 1958, peristiwa tragis menerpa kepemimpinan Masyumi. Tokoh yang telah

¹⁴Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Op.Cit.*, hlm. 34.

berhasil mentransformasi sebuah partai pemerintah, termasuk yang telah mengubah warna kepengurusan gerakannya ke arah moderasi dan legalisme, baru saja mempermainkan hukum dan mengoyak persatuan di Tanah Air. Buronnya ketua partai dan dua pemimpin terasnya telah menjerumuskan Masyumi ke dalam situasi pelik. Selama itu, garis perlawanan partai terhadap rencana presiden Soekarno selalu berpijak pada ketentuan-ketentuan tegas yang tercantum pada teks pendiri Republik Indonesia yang mereka tafsirkan secara lugas. Sikap partai yang tidak menuding tegas para pemimpinnya yang terlibat PRRI membuat Masyumi kehilangan segala kredibilitasnya.¹⁵

C. Definisi Konsep Negara

Ide tentang negara Islam merupakan isu utama yang berkembang pada awal Indonesia merdeka. Natsir memiliki pandangan yang moderat soal Islam dan negara. Dalam pandangannya tentang negara, Natsir mengatakan bahwa suatu negara akan bersifat Islam bukan karena secara formal disebut “negara Islam” ataupun “berdasarkan Islam”, melainkan negara itu disusun “sesuai dengan ajaran-ajaran Islam”, baik dalam teori maupun praktiknya. Dasar negara dapat dirumuskan dalam

¹⁵Remy Madinier, *L'Indonesie, entre Democrate musulmane et Islam integral, Histoire du Parti Masjumi*, Tonny Pasuhuk, Terj. “Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral”, Jakarta: Mizan., 2013, hlm. 245.

klausal-klausal yang bersifat umum sepanjang mencerminkan kehendak-kehendak Islam.¹⁶

Mohammad Natsir adalah salah satu tokoh Islam Indonesia yang berbicara soal negara Islam Indonesia. Dalam pidatonya Natsir mengatakan Indonesia hanya mempunyai dua pilihan: *ladiniyah* atau *diniyah*. Pancasila menurut Natsir adalah *ladiniyah* karena itu sekuler, tidak bersedia mengakui wahyu sebagai sumbernya. Pancasila adalah hasil panggilan dari masyarakat. Pandangan ini disandarkan karena negara Islam atau negara berdasarkan Islam, merupakan dasar yang tidak mungkin salah, seperti dasar filosofis yang dibuat oleh manusia. Pandangan ini juga memiliki argumen bahwa hukum yang harus ditaati adalah hukum yang berasal dari Tuhan, karena Tuhanlah yang maha benar, bukan manusia. Oleh karenanya, hukum yang dibuat manusia sangat mungkin bertentangan hukum Tuhan karenanya biasa ditolak. Islam dan hukum Islam tidak demikian karena itu harus menjadi pedoman wajib umat Islam.¹⁷

Dasar pengambilan pemahaman di atas sering kali pada kaidah yang menyatakan tidak ada hukum di muka bumi, kecuali didasarkan pada pembuat hukum yang maha benar dan abadi yakni Tuhan (Allah SWT). Oleh sebab itu umat Islam tidak boleh

¹⁶ Didin Saefuddin, *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam: Biografi Intelektual 17 Tokoh*, Jakarta: Grasindo, 2003, hlm. 213.

¹⁷*Ibid.*

mengambil dasar hukum buatan manusia, seperti juga Pancasila sebagai sumber hukum dan ideologi adalah menyalahi paham hukum yang benar dan kekal adalah yang datang dari Tuhan. Ajaran Islam mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat dan dapat menjamin keragaman hidup antarberbagai golongan dalam negara dengan penuh toleransi.¹⁸

Mohammad Natsir menggunakan istilah modernisasi politik Islam yang mengandung arti sebagai sikap dan pandangan yang berusaha untuk menerapkan ajaran dan nilai-nilai kerohanian, sosial, dan politik Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menyesuaikannya dengan perkembangan-perkembangan mutakhir dalam sejarah peradaban umat manusia. Dalam term politik seperti ini, Natsir mewajibkan setiap umat Islam untuk berpolitik sebagai sarana dakwah Islam. Sebagai seorang muslim, kita tidak dapat melepaskan diri dari ideologi kita, yakni ideologi Islam. Bagi kita, menegakkan Islam itu tidak dapat dilepaskan dari menegakkan masyarakat, menegakkan negara, dan menegakkan kemerdekaan.

Secara garis besar, ada dua pandangan yang berbeda tentang politik Islam. Namun, sama-sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan. Pada

¹⁸Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 10

pandangan pertama, beberapa kalangan Muslim beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara, *Syari'ah* harus diterima sebagai konstitusi negara. Pada pandangan lain, beberapa kalangan Muslim berpendapat bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara (sistem politik) yang harus dijalankan *ummah*.¹⁹

Dari kedua pandangan di atas, nampaknya Natsir termasuk dalam kelompok pertama, dia berpendapat bahwa negara tidak perlu disuruh untuk didirikan Rasulullah. Dengan atau tanpa Islam, negara bisa berdiri, dan memang berdiri sebelum dan sesudah Islam, dimana saja ada segolongan manusia yang hidup bersama-sama dalam suatu masyarakat. Tentang ada negara yang teratur dan ada yang kurang teratur adalah soal biasa. Tetapi bagaimanapun kedua-duanya adalah negara, dengan atau tidak dengan Islam.

Mengenai negara sebagai institusi, Natsir mengikuti pendapat-pendapat tentang persyaratan negara modern. Negara harus memiliki wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan, konstitusi, atau sumber hukum dan kekuasaan lain yang tidak tertulis. Bila membandingkan antara masyarakat dengan negara, Natsir mengikuti pendapat Ibnu Khaldun, yaitu bahwa di antara keduanya seperti hubungan antara benda dan bentuknya, yang

¹⁹Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998, hlm. 12.

satu bergantung yang lain. Oleh sebab itu, kata Natsir negara itu harus mempunyai akar yang langsung tertanam dalam masyarakat. Sesuai dengan garis argumen yang diajukannya, Natsir mengajak orang untuk melihat bahwa Islam sebagai agama anutan mayoritas rakyat Indonesia cukup punya akar dalam masyarakat, dan karena itu punya alasan kuat untuk dijadikan dasar negara.²⁰

Natsir dalam mengupas masalah hubungan Islam dan Cnegara mendasarkan urainnya kepada ayat al-Qur'an surah adz-Dzariyat ayat 56 berbunyi:

 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”²¹

Dari sini Natsir mengembangkan teorinya dengan mengatakan: “Seorang Islam hidup di atas dunia ini dengan cita-cita kehidupan supaya menjadi seorang hamba Allah dengan arti sepenuhnya, yakni hamba Allah yang mencapai kejayaan dunia dan kemenangan di akhirat”. Dunia dan akhirat ini oleh kaum muslim sama sekali tidak boleh dipisahkan dari ideologi mereka.²²

²⁰Didin Saefuddin, *Op. Cit.*, hlm. 215.

²¹Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama, *Loc. Cit.*, hlm.

²²Zuly Qodir, *Op. Cit.*, hlm. 11.

Mengenai konsep negara, Natsir juga mengutip sebuah hadis yang berbunyi:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أُمَّ رَيْنٍ لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِحِمَا كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ
(رواه ابو داود ومالك)

“Telah Aku tinggalkan dua perkara (pedoman hidup) yang menjamin kamu tidak akan tersesat dalam hidup selamanya, jika kamu berpegang teguh pada keduanya: kedua pedoman hidup itu ialah Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.”
(HR. Abu Daud dan Malik).

Pandangan Natsir tentang negara memang tampaknya bersesuaian dengan pendapat Abul A’la Maududi dari Pakistan yang mengatakan bahwa Syari’ah merupakan skema kehidupan yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan.²³ Namun, Natsir dalam hal mengimplementasinya berbeda. Maududi tegas-tegas menolak demokrasi dan mengusung *khilafah*, serta *syura*. Sementara Natsir sebagai seorang modernis yang mendukung penyatuan agama dan negara sangat kritis dan tetap sebagai demokrat sejati dengan mengusung konsep “Theistik Demokrasi”. Yang dimaksud Natsir tentang Theistik Demokrasi tersebut adalah demokrasi yang didirikan di atas nilai-nilai ketuhanan, dimana keputusan mayoritas berpedoman pada

²³ Lili Romly, *Islam Yes, Partai Islam Yes*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006, hlm. 23.

ketuhanan.²⁴ Islam, hemat Natsir, tidak harus 100% demokratis dan tidak harus 100% otokratis, Islam adalah Islam. Dalam pandangannya, keputusan-keputusan demokratis diimplementasikan hanya pada masalah-masalah yang tidak disebutkan secara spesifik dalam syari'ah, sehingga tidak ada keputusan demokratis, misalnya pada larangan judi dan zina.²⁵ Pandangannya itu sejalan dengan apa yang diperjuangkannya secara teori ataupun praktik politik.

Natsir dikenal sebagai seorang tokoh yang konsisten ingin memperjuangkan berdirinya negara Indonesia dalam konstruk negara Islam yang dapat menerapkan semua syari'at Islam bagi pemeluknya. Dan strategi yang dilakukannya adalah strategi damai lewat debat atau politik praktis, terutama lewat partai Masyumi. Meskipun bagi mereka yang tidak senang dalam perdebatan panjang soal ideologi bahwa apa yang dipikirkan Natsir adalah sesuatu yang menyia-nyiakan waktu saja, tetapi hal itu bisa dinilai sesuai dengan panggilan masanya, yaitu masa perang dingin. Natsir dalam hal ini bahkan lebih pintar dibanding

²⁴Yusril Ihza Mahendra, "Mohammad Natsir dan Sayyid Abul A'la Maududi: Telaah Tentang Dinamika Islam dan Transparansinya ke dalam Ideologi Sosial dan Politik", dalam *Pemikiran dan Perjuangan Natsir*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 81.

²⁵Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, hlm. 75.

dengan para anggota DPR saat ini, karena tidak berpikir tentang penyalahgunaan kekuasaan dan saling kontrol.²⁶

D. Karya-karya Mohammad Natsir

Perjalanan hidup Mohammad Natsir di negeri ini sebelum merdeka sampai dengan akhir hayatnya telah menghasilkan karya-karya, baik tentang politik maupun keagamaan. Penyusun akan menjelaskan secara singkat dari beberapa karya-karya beliau yang telah menginspirasi banyak orang.

Islam Sebagai Dasar Negara adalah salah satu karya Natsir yang melegenda, buku ini di dalamnya berisi tentang keinginan Natsir menjadikan Islam sebagai asas negara. Dengan mengusung konsep Theistik Demokrasi, yang berarti demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, ia juga berpendapat bahwa dasar negara ialah yang mampu membangun jiwa dan membina rakyat lahir dan batin, sehingga menjadi satu bangsa yang berakhlak, bangsa yang bersusila, yang dapat mengatur diri sendiri, tanpa setiap waktu harus ditindaki oleh aparat-aparat negara.²⁷

Fiqhud Da'wah merupakan salah satu karya Natsir tentang keagamaan, khususnya dalam dunia dakwah. Buku ini

²⁶Sukron Kamil, *Islam dan Politik di Indonesia Terkini*, Jakarta: Pusat Studi Indonesia dan Arab, 2013, hlm. 134.

²⁷Mohammad Natsir, *Op., Cit.*

dibuat menjadi sebuah catatan-catatan untuk kursus latihan calon mubaligh. Buku ini mengandung dasar-dasar pokok bagi dakwah serta penyelenggaranya, dimaksudkan sebagai pembuka jalan para calon mubaligh-mubaligh kepada tuntunan-tuntunan pokok dalam melaksanakan tugas mulia mereka.²⁸

World of Islam Festival dalam Perspektif Sejarah, merupakan kenangan Natsir ketika menghadiri festival dunia Islam di London pada bulan April sampai dengan Juni tahun 1976. Buku ini menguraikan peradaban Islam dari zaman dulu sampai sekarang yang bukan saja menjadi pedoman bagi orang Islam sendiri melainkan juga bagi orang di luar peradaban Islam, baik dalam Ilmu Teknik maupun Sosial Budaya.²⁹

Dunia Islam dari Masa ke Masa, merupakan karya Natsir dalam mengisahkan perjalanannya ke berbagai negara. Melihat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia, khususnya negara-negara barat. Pada saat itu Natsir berpolemik dengan Soekarno soal kedudukan negara dan agama yang mencontohkan kemajuan Turki yang di pimpin Kemal Attartuk. Natsir tetap pada pendiriannya, bahwa nilai-nilai dasar Islam masih relevan

²⁸ Mohammad Natsir, *Fiqhud Da'wah*, Semarang: Kerja Sama Yayasan Kesejahteraan Pemuda Islam Surakarta dan Ramadhani, 1981.

²⁹ Mohammad Natsir, *World of Islam Festival*, Jakarta: Media Da'wah, 1985.

dengan perkembangan apa pun di dunia demi kebahagiaan manusia sendiri.³⁰

Islam dan Kristen di Indonesia, merupakan karangan Natsir yang menekankan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia ini haruslah didasari oleh saling pengertian satu sama lain. Dan saling pengertian itu harus dibina dengan baik. Umat Islam tidak menganggap musuh terhadap orang-orang yang bukan Islam, umat Islam hanya akan memusuhi orang-orang yang mengganggu agama Islam.³¹

Buku-buku di atas merupakan beberapa dari sekian banyak karya-karya Natsir yang telah dijadikan rujukan para penulis dalam menganalisa peristiwa-peristiwa di negeri ini mulai Indonesia sebelum merdeka sampai saat ini. Hal ini mencerminkan bahwa beliau bukan hanya seorang politikus, tetapi seorang ulama besar yang pandai berpolitik, sehingga pantas dijadikan teladan hidup dalam berbangsa dan bernegara.

³⁰ Mohammad Natsir, *Dunia Islam dari Masa ke Masa*, Jakarta: Panji Masyarakat, 1981.

³¹ Mohammad Natsir, *Islam dan Kristen di Indonesia*, Jakarta: Media Da'wah, 1983.

BAB III

GAMBARAN UMUM PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

A. Latar Belakang Berdirinya Partai Bulan Bintang (PBB)

Munculnya partai politik berbasis agama tidak lepas dari adanya kesempatan yang luas setelah keruntuhan pemerintahan Orde Baru, adanya sumber daya yang memadai, dan motivasi untuk memengaruhi proses-proses politik berdasarkan agama-agama tertentu. Meskipun demikian, kemunculannya tidak bisa semata-mata dipahami sebagai akibat dari runtuhnya pemerintahan otoriter dan menguatnya proses demokratisasi. Kalaupun yang terakhir ini memiliki peran, lebih sebagai faktor hantaran yang memungkinkan adanya percepatan bagi lahirnya kembali politik aliran berbasis agama.¹

Kehadiran Partai Bulan Bintang memang telah dipersiapkan jauh sebelum *euphoria* reformasi menghinggapi semua masyarakat, khususnya masyarakat partisan. Embrio kebangkitan kekuatan politik Islam ini bermula dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang dirintis oleh beberapa tokoh

Islam, diantaranya DR. H. M. Natsir, KH. Masykur dan Prof. Dr. H. M. Rasyidi. Forum ini sendiri dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1989 untuk menyongsong datangnya tahun baru Islam, 1 Muharram 1411 H, yang bertepatan pula dengan hari

¹Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2010, hlm. 313.

kemerdekaan republik, 17 Agustus 1989. Kehadiran forum ini tidak terlepas dari keprihatinan tokoh-tokoh di atas terhadap gerakan *tanshiryah* di tanah air sepanjang kekuasaan Orde Baru. Selang berapa lama, kehadiran forum ini diperkukuh sebagai wadah perjuangan dalam mempertahankan akidah Islamiyah pada tanggal 11 Desember 1993. Banyak pemimpin Islam bergabung di antaranya terdapat nama Dr. Anwar Harjono, Rajab Ranggasoli, Prof. Dr. Ismail Suny, H. Nuddin Lubis, dan lain-lain. Bergabungnya banyak pemimpin Islam ini membuat forum tersebut perlu melakukan reorganisasi. Reorganisasi ini dilakukan secara marathon sejak tanggal 8 Oktober 1994 hingga tanggal 18 Februari 1995 oleh panitia lima yang beranggotakan Dr. Anwar Harjono, KH. Achmad Syaichu, Dr. Bustaman, SH., Ir. A.M Luthfi dan Geys Ammar, SH. Panitia ini berhasil menghimpun kurang lebih 39 eksponen ormas Islam, yang organisasinya sendiri secara historis dikenal sebagai pendukung fanatik partai politik Islam Masyumi.²

Sebulan sekali forum ini dibuka untuk membicarakan situasi politik tanah air, khususnya yang berkaitan dengan umat Islam. Pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh forum ini terdapat lontaran yang menginginkan agar forum ini dijadikan sebagai cikal bakal partai politik Islam apabila situasi politik di

² Hairus Salim HS (eds), *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, Yogyakarta: LKiS dan CH-PPS, 1999, hlm. 56.

tanah air memungkinkan untuk itu. Sejalan dengan keinginan itu maka pada pertemuan forum ini di kediaman Dr. Anwar Harjono pada tanggal 12 Mei 1998 diproklamirkan pembentukan Badan Koordinasi Ummat Islam (BKUI). Keanggotaan BKUI bukan lagi bersifat perorangan melainkan kelembagaan. Di antara yang termasuk dalam keanggotaan BKUI ini terdapat ICMI, KISDI, PERSIS, PERTI, Al-Irsyad, dan lain-lain. Pada perkembangan selanjutnya, keanggotaan BKUI bertambah hingga mencapai 40 lembaga. Di antara yang baru itu terdapat HMI, PII, PPMI, BAKOMUBIN, dan lain-lain.³

Musyawahar Nasional I BKUI yang berlangsung di Marabahan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, pada 4 Juni 1998, lontaran untuk mendirikan partai Islam yang baru kembali menguat. Namun terjadi pro-kontra antara yang setuju dengan yang tidak, akhirnya disepakati bahwa BKUI tidak akan menjadi partai politik. Lanjutan Munas I di Kramat Raya 45, 10 Juni 1998, disepakati sebuah badan yang disebut Badan Pekerja BKUI yang terdiri dari sebelas organisasi dakwah dan ormas Islam. Sejak Munas I itulah, persiapan kearah pembentukan partai Islam semakin intensif dilakukan oleh “Tim Partai” yang diketuai oleh Mohammad Solaiman. Adapun BKUI sendiri, dalam kaitan pendirian partai ini, hanyalah sebagai fasilitator sehingga

³*Ibid.*

hubungannya dengan ormas Islam yang lain tetap terjaga dan terpelihara.⁴

Setelah melakukan beberapa kali pertemuan, Tim Partai atau Komisi Politik BKUI menyepakati masalah prinsip yang hendak dituangkan dalam Anggaran Dasar, yaitu nama Partai Bulan Bintang. Kesepakatan ini langsung diikuti dengan penandatanganan ikrar berdirinya Partai Bulan Bintang pada tanggal 17 Juli 1998. Pada rapat yang diselenggarakan di kediaman Dr. Anwar Harjono, 23 Juli 1998, Tim Partai menyepakati Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra sebagai pemimpin partai. Pada tanggal 26 Juli 1998, dengan mengambil tempat di halaman Masjid Agung Al-Azhar, partai tersebut di deklarasikan. Dengan demikian, resmilah sudah sebuah partai Islam berdiri dengan nama mentereng, Partai Bulan Bintang.⁵

1. Asas dan Tujuan PBB

Warga PBB meyakini bahwa Islam adalah agama dan sekaligus jalan kehidupan. Islam di pandang sebagai agama *rahmatan lil-alamin* yang bersifat universal. PBB akan menggunakan prinsip-prinsip universal itu sebagai rujukan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang meneliking masyarakat dan bangsa, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi, praktik penyalahgunaan

⁴*Ibid.* hlm. 57.

⁵*Ibid.*, hlm. 58.

kekuasaan, kepentingan antara hubungan pusat dan daerah, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), tindak kekerasan dan lain-lain. Karena itu, bagi PBB yang paling mendasar adalah bagaimana agar prinsip, jiwa, semangat Islam hadir dalam setiap gerak langkah partai.⁶

PBB memandang perlu untuk mencantumkan Islam sebagai asas dan akidah partai.⁷ Berasas dan berakidah Islam menurut penafsiran PBB berarti bahwa warga partai meyakini dengan sungguh-sungguh kebenaran Islam sebagai agama Allah yang diturunkan untuk mengeluarkan umat manusia dari suasana gelap gulita menuju suasana terang benderang. Setiap ucapan, pemikiran dan tindakan warga partai senantiasa berlandaskan kepada ajaran Islam universal yang melampaui ruang dan waktu. Bagi warga Bulan Bintang, ajaran Islam merupakan sumber inspirasi, motivasi dan hukum dalam duniawi. Ajaran Islam yang bersifat universal itu meliputi pokok-pokok akidah, syariat dan akhlak serta berbagai bidang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

⁶Yusril Ihza Mahendra, “Dengan Prinsip *Ummatan Wasatan* Kita Perjuangkan Sistem, Bukan Orang, “ dalam Sahar L. Hassan et al., *Memilih Partai Islam: Visi, Misi, Persepsi*, Jakarta : Gema Insani, 1998, hlm. 22.

⁷Anggaran Dasar PBB Bab II Pasal 3, dikutip dari www.bulan-bintang.org., pada tanggal 30 April 2016.

Warga Bulan Bintang meyakini bahwa pokok-pokok akidah telah dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan Sunnah, begitu pula yang berhubungan dengan peribadatan. Sedangkan di bidang muamalah, al-Qur'an dan Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip umum dan sedikit uraian, sehingga merupakan bidang yang luas untuk melakukan ijtihad bagi pemecahan masalah-masalah baru yang dapat timbul setiap saat dengan selalu memperhatikan keadaan tempat dan zaman. Partai secara leluasa dapat menggali berbagai warisan pemikiran yang berkembang sepanjang sejarah umat manusia dengan menimbang baik buruknya. Tradisi Islam mengakui dua jenis kitab Allah. Pertama, adalah mushaf yang merupakan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., kedua adalah "alam terbentang jadi guru" berupa hukum-hukum alam, kehidupan dan kemasyarakatan dari sunnah-Nya yang tidak berubah. Warga Bulan Bintang bersifat positif terhadap jenis tradisi yang kedua sepanjang tidak bertentangan dengan wahyu langsung dari Allah.⁸

Sedangkan berakidah Islam bermakna bahwa setiap anggota partai dengan sungguh-sungguh meyakini keesaan Allah sebagai Tuhan satu-satu-Nya yang patut dan wajib

⁸ *Ibid.*

disembah, diagungkan, ditaati dan diperhatikan perintah dan larangan-Nya. Dengan kalimat *la ilaha illallah*, partai berkeyakinan bahwa dalam seluruh alam ini, hanya Allah semata yang tidak berubah. Tidak ada pengkultusan kepada selain Allah, dan perubahan harus mengikuti jalan-Nya, yang berarti jalan keluhuran, kebenaran, keadilan dan kebahagiaan seluruh umat manusia.

Umat manusia dipandang sebagai khalifah atau pewaris Allah di muka bumi dalam menjalankan *iradah*-Nya. Karenanya manusia bertanggung jawab kepada Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, warga Bulan Bintang harus menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kejujuran serta memperjuangkan tegaknya tatanan masyarakat yang berdasarkan iman dan takwa di bawah naungan hukum dan konstitusi. Nilai-nilai dan prinsip yang diajarkan Islam terus diupayakan untuk mengisi kehidupan bernegara itu. Dalam hal ini, PBB berpendapat bahwa Dasar Negara Republik Indonesia (Pancasila) selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam universal.

Adapun tujuan PBB dibagi menjadi dua jenis, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.⁹Tujuan umum didirikannya partai ini adalah terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 dan berkembangnya kehidupan demokrasi dengan menghormati kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan prinsip-prinsipajaran Islam. Sedangkan Tujuan khusus didirikannya Partai ini adalah tegaknya syariat Islam dalam setiap individu dan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Basis Sosial

Keanggotaan PBB terdiri atas enam macam: anggota biasa, anggota kader, anggota teras, anggota kehormatan, anggota istimewa, dan anggota khusus partai yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP). PBB memberi kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah menikah, pandai membaca dan menulis serta menyetujui AD partai untuk menjadi anggota. Seseorang yang berminat menjadi anggota diwajibkan memenuhi persyaratan administratif dan membayar uang pangkal.

⁹Anggaran Dasar PBB Bab II Pasal 4, dikutip dari www.bulan-bintang.org, pada tanggal 30 April 2016.

Keanggotaan seseorang yang telah memenuhi persyaratan kemudian disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat¹⁰.

Seorang anggota yang diberi hak bicara dan hak suara dapat berhenti menjadi anggota karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaannya sendiri, sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan AD/ART Partai, diberhentikan oleh partai karena melakukan suatu pelanggaran, dan telah menjadi anggota atau pengurus partai politik lain.¹¹ Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan diajukan atau dimohonkan oleh pimpinan partai tingkat cabang kepada Badan Kehormatan Cabang untuk diputuskan. Sebelum diberikan sanksi pemberhentian dari kepengurusan atau keanggotaan, pengurus atau anggota mempunyai hak melakukan pembelaan diri di hadapan Badan Kehormatan yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadilinya. Apabila anggota yang diberikan sanksi pemberhentian dari keanggotaan tidak menerima, yang bersangkutan dapat mengajukan upaya banding kepada Badan Kehormatan Wilayah, dan apabila yang bersangkutan tidak menerima Keputusan Badan Kehormatan Wilayah dapat mengajukan

¹⁰ Anggaran Rumah Tangga PBB Bab I Pasal 1, dikutip dari www.bulan-bintang.org, pada tanggal 30 April 2016.

¹¹ Anggaran Rumah Tangga PBB Bab I Pasal 4, dikutip dari www.bulan-bintang.org, pada tanggal 30 April 2016.

upaya kasasi kepada Badan Kehormatan Pusat. Keputusan Badan Kehormatan atas upaya kasasi bersifat final dan mengikat, serta wajib dilaksanakan oleh pimpinan partai.¹²

Dengan keanggotaan tersebut, PBB mengisyaratkan tidak menutup pintu bagi orang-orang non-Muslim untuk bergabung, sekalipun notabene ia merupakan partai Islam. Namun pada saat yang sama, sebenarnya PBB menutup pintu bagi masuknya orang-orang yang beragama selain Islam, yang menyebabkan partai ini tidak bisa lagi dikatakan sebagai partai terbuka. Keharusan menyetujui AD partai bagi siapapun yang berminat menjadi anggota adalah penghalangnya. Sebagaimana yang tercantum dalam AD-nya, partai ini berasas dan berakidah Islam. Tentu saja poin ini membuat orang-orang non-Muslim berpikir lebih jauh, kalau tidak malah menolak untuk bergabung dengan PBB. Karena ketika ia terlibat dalam kegiatan-kegiatan partai, yang mengemuka dalam dinamika partai adalah warna-warna Islam, sedangkan akidah yang ia yakini harus terpinggirkan dari politik partai. Indikasi kedua yang bisa menggugurkan identitas PBB sebagai partai terbuka seperti seringkali disuarakan oleh ketua umumnya adalah absennya

¹² Anggaran Rumah Tangga PBB Bab I Pasal 6, dikutip dari www.bulan-bintang.org, pada tanggal 30 April 2016.

pemuka atau orang-orang non-Muslim di kepemimpinan partai.¹³

Dari dua catatan di atas, dapat kita telusuri lebih lanjut basis sosial PBB. Pertama sekali yang mesti digarisbawahi adalah PBB tidak mungkin memperoleh dukungan dari kalangan non-Muslim, meskipun menegaskan diri sebagai partai terbuka. Satu-satunya basisi sosial PBB adalah umat Islam sendiri. Namun PBB harus menerima kenyataan bahwa lahan suara yang bisa digali dari umat Islam menyempit dengan maraknya partai-partai Islam di masa pasca-Soeharto. Umat Islam secara kasar dapat dipilah ke dalam dua kutub besar, Muhammadiyah dan NU. Pada masa sekarang kebanyakan aspirasi politik NU disalurkan melalui “partai formal” mereka yakni PKB. Mereka yang tak puas dengan keberadaan PKB dapat memilih partai nahdliyyin yang lain semisal PNU, PKU, dan Partai SUNI. Sementara orang-orang NU yang telah menikmati keuntungan politik di PPP akan tetap di partai ini, tidak beranjak ke partai nahdliyyin yang telah didirikan. Sedangkan warga Muhammadiyah yang terpecah secara politik, sebagian suaranya dihibahkan kepada PAN, PPP, dan sedikit ke Golkar. Sebagian lagi dalam jumlah yang

¹³*Ibid.*

tidak terlalu banyak tumbuh menjadi pemilih mengambang.¹⁴

Dari lahan inilah PBB memiliki peluang menarik dukungan. Peluang ini semakin lebar mengingat sebagian pemuka-pemuka Muhammadiyah juga menjadi penanda tangan deklarasi PBB. Di samping itu, basis sosial PBB muncul dari orda dan ormas Islam yang tidak berafiliasi baik dengan Muhammadiyah dan NU. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah beberapa ormas Islam yang tergabung dalam BKUI dan mendukungnya untuk memfasilitasi kelahiran PBB. Mereka menyebut dirinya dengan keluarga Bulan Bintang, merupakan pendukung nyata dan paling besar bagi PBB. Penggunaan simbol bulan bintang oleh partai ini dimaksudkan untuk menunjukkan kesinambungan historis dengan perjuangan politik umat Islam di waktu lalu, terutama dengan Partai Politik Islam Masyumi. Di satu sisi, hal ini mengindikasikan kedekatan psikologis di antara kedua partai yang berbeda zaman itu. Di sisi lain, dan tampaknya yang lebih penting adalah pernyataan secara tak langsung dari PBB kepada masyarakat bahwa sejatinya partai inilah yang paling pantas dan memadai bagi warga

¹⁴Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*, Jakarta: LP3ES, 2003, hlm. 71.

Masyumi dan penerusnya untuk dijadikan wadah yang menampung dan memperjuangkan aspirasinya.

Meskipun demikian, eforia politik yang melanda rakyat Indonesia di masa pasca-Soeharto menghinggapi pula komunitas Masyumi. Eforia ini di ungkapkan lewat membangun parpol baru yang dinyatakan baik secara eksplisit maupun implisit memiliki ikatan historis dengan Partai Politik Islam Masyumi yang lahir di awal November 1945 itu. Yang secara terang-terangan mengaku sebagai “anak” Masyumi ini adalah Partai Politik Islam Indonesia Masyumi di bawah pimpinan Abdullah Hehamahua dan Partai Masyumi Baru di bawah pimpinan Ridwan Saidi. Sedangkan PBB yang banyak didukung oleh tokoh-tokoh tua Masyumi, dan Partai umat Islam (PUI) yang didirikan dan diketuai oleh Prof. Dr. Deliar Noer adalah dua partai yang walaupun tidak memakai nama Masyumi sebagai identitas partai, namun di dalam relung kedua partai ini mengalir deras roh Masyumi.¹⁵

Dengan terbelahnya warga Masyumi menjadi beberapa parpol Islam tertentu, maka PBB tidak dapat memonopoli penggarapan ladang basis sosial terluas, di mana ia seharusnya menggali dukungan secara maksimal.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 72.

PBB harus bersedia berbagi lahan dukungan dengan “anak-anak” Masyumi yang lain. Tentu saja hal ini merupakan tantangan politik yang tidak ringan bagi PBB, sehingga dituntut adanya pengelolaan dan komunikasi yang mendukung baik secara internal sesama pengurus partai dan eksternal partai dan basis sosialnya.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi DPP PBB terdiri atas Majelis Syura, Pimpinan Pusat, dan Badan Kehormatan Pusat. DPW terdiri atas Majelis Pertimbangan Wilayah, Pimpinan Wilayah, dan Badan Kehormatan Wilayah. Sedangkan DPC terdiri atas Majelis Pertimbangan Cabang, Pimpinan Cabang, dan Badan Kehormatan Cabang.¹⁶Struktur Organisasi PBB dibagi menjadi beberapa tingkat. Pada tingkat nasional ada Dewan Pimpinan Pusat (DPP), sedangkan ditingkat Provinsi atau Daerah Tingkat I ada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC), Dewan Pimpinan Ranting (DPRt), masing-masing menduduki kepemimpinan di tingkat Kabupaten/Kotamadya/Daerah

¹⁶Anggaran Dasar PBB Bab VI Pasal 11, dikutip dari www.bulan-bintang.org, pada tanggal 30 April 2016.

Tingkat II, kepemimpinan di tingkat kecamatan, dan kepemimpinan di tingkat kelurahan.¹⁷

Susunan DPP terdiri atas Pimpinan Harian yaitu: ketua umum, sekurang-kurangnya seorang wakil ketua umum, beberapa orang ketua yang bertugas mengkoordinasikan beberapa departemen, seorang sekretaris jenderal, beberapa orang wakil sekretaris jenderal, seorang bendahara umum, beberapa orang bendahara, beberapa orang ketua departemen. Serta ketua umum Pimpinan Pusat yang dipilih dan ditetapkan oleh Mukhtar yang menduduki jabatan minimal 5 (lima) tahun dan tidak boleh menjabat maksimal dua periode.¹⁸

Pimpinan Pusat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya didampingi oleh Majelis Syuro yang berkewajiban memberikan fatwa dan atau pertimbangan, terutama kebijakan partai yang menyangkut masalah syar'i baik diminta maupun tidak. Anggotanya mencakup tokoh senior, cendekiawan dan ulama yang jelas integritasnya. Untuk melancarkan tugas Majelis Syuro, seluruh pekerjaan kesekretariatan dilakukan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Partai. Keberadaan Majelis Syuro dalam struktur organisasi

¹⁷Anggaran Dasar PBB Bab VI Pasal 13, dikutip dari www.bulan-bintang.org, pada tanggal 30 April 2016.

¹⁸Anggaran Rumah Tangga PBB Bab III Pasal 10, dikutip dari www.bulan-bintang.org, pada tanggal 30 April 2016.

PBB ini menegaskan ikatan historis antara warga Bulan Bintang saat ini dengan para pendahulunya yang terkumpul dalam Politik Islam Masyumi.

4. Kepemimpinan Partai

Seperti yang dijelaskan di awal bahwa kelahiran PBB dibidani oleh BKUI yang menghimpun banyak organisasi dakwah (orda) dan ormas Islam. Piagam deklarasi PBB sendiri ditandatangani oleh 70 orang pendiri yang penandatangannya berlangsung menurut dua tahap. Tahap pertama tercatat tanda tangan 38 orang pendiri, diikuti oleh 32 orang lagi pada tahap kedua. PBB memang didirikan secara perorangan, namun kehadirannya didukung oleh 22 orda (organisasi dakwah) dan ormas Islam yang tergabung dalam BKUI yang tokoh-tokohnya ikut terlibat dalam menggodok kelahiran partai dan atau ikut menandatangani deklarasi partai.

Kehadiran sejumlah organisasi tersebut dalam PBB memang tidak dapat dipisahkan dari keinginan tokoh-tokoh partai yang mengharapkan partainya menjadi wadah bersatunya seluruh elemen umat Islam Indonesia, sebagaimana hal ini pernah dipraktikkan oleh Masyumi di masa lalu. PBB akan menerima kelompok Islam manapun untuk bergabung dengannya tanpa mempermasalahkan corak keislaman tiap-tiap unsur yang bisa beragam. Dalam partai

dengan karakter semacam ini, yang tidak dapat dielakkan lagi adalah munculnya kemajemukan yang pada gilirannya menimbulkan bermacam-macam kelompok dengan kepentingan yang beragam. Langkah awal dari upaya menghargai kemajemukan sekaligus untuk meredam meruyaknya konflik dalam tubuh partai, dilakukan lewat memasukkan wakil-wakil dari organisasi pendukung partai ke dalam kepengurusan PBB. Langkah ini membuat PBB mempunyai susunan pengurus yang sangat banyak, bahkan paling banyak dibandingkan partai-partai Islam yang ada.

Susunan DPP PBB terbagi menjadi: Majelis Syuro (ketua umum, wakil ketua umum dan anggota-anggota), Pimpinan Pusat (ketua umum, wakil ketua umum, dan ketua-ketua, sekretaris jenderal, wakil sekretaris jenderal, bendahara-bendahara anggota pleno), dan departemen-departemen, serta Badan Otonom. Saat ini ketua umum partai dijabat oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra dan Jurhum Lantong sebagai Sekretaris Jenderal. Anggota yang diangkat menjadi pimpinan harus memenuhi persyaratan, antara lain: taat dan tertib melaksanakan ibadah mahdhah, mampu membaca al-Qur'an secara fasih, mampu menjadi imam shalat lima waktu, memiliki wawasan yang luas, mampu meninggalkan perilaku yang tidak bermanfaat, menampilkan keteladanan (*uswatun hasanah*) dengan prinsip *shidiq*,

amanah, fathanah dantabligh, dan seorang tokoh masyarakat, serta bersikap adil dalam mengambil sebuah keputusan.¹⁹

5. Pengambilan Keputusan

Pada dasarnya keputusan yang diambil di dalam partai bersumber pada aspirasi seluruh anggota. Mereka adalah pemegang kedaulatan tertinggi di dalam partai. Untuk mengolah aspirasi itu, partai mengadakan mekanisme pengambilan keputusan berupa muktamar, Muktamar Luar Biasa (MLB), Musyawarah Dewan Partai, Musyawarah Kerja Nasional dan Rapat-rapat yang bersifat kolegial.²⁰

Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi di dalam organisasi yang diselenggarakan oleh DPP setiap lima tahun sekali. Yang tercatat sebagai peserta muktamar adalah seluruh anggota Pengurus Pusat, Wakil-wakil Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang. Secara garis besar tujuan penyelenggaraan muktamar mencakup empat hal, yaitu: (1) memilih dan menyatakan sikap terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh Pengurus Pusat organisasi sebelumnya, (2) menetapkan garis-garis besar program dan kebijakan organisasi masa bakti

¹⁹ Anggaran Rumah Tangga PBB Bab III Pasal 12, dikutip dari www.bulan-bintang.org, pada tanggal 30 April 2016.

²⁰ Anggaran Rumah Tangga PBB Bab VII Pasal 23, dikutip dari www.bulan-bintang.org, pada tanggal 30 April 2016.

berikutnya, (3) menanggapi serta menyikapi keadaan dan hal-hal yang dihadapi dalam dunia kepemudaan serta umat Islam pada khususnya, dan rakyat, bangsa dan negara pada umumnya, (4) memilih Dewan Pimpinan Pusat untuk masa bakti lima tahun berikutnya.

Yang tercatat sebagai peserta Muktamar adalah anggota DPP termasuk ketua dan para wakil ketua Majelis Syuro, wakil-wakil DPW, wakil-wakil DPC, ketua dan empat orang anggota fraksi partai yang mewakili fraksi partai di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat serta ketua dan dua orang anggota fraksi partai yang mewakili fraksi partai di dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap peserta yang berhak hadir itu juga memiliki hak bicara dan satu hak suara. Dalam setiap muktamar, penyelenggara (DPP) berhak mengundang peninjau yang berhak berbicara tanpa hak suara.

Muktamar Luar Biasa diselenggarakan oleh DPP atas usul tertulis yang diajukan lebih dari separuh jumlah wilayah dan lebih separuh dari jumlah cabang. Namun dalam kondisi tertentu, Muktamar Luar Biasa dapat dilaksanakan oleh para pengusulnya bukan oleh DPP. Kondisi yang dimaksud ialah apabila dalam waktu tenggang tiga puluh hari DPP tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa dalam waktu

selambat-lambatnya tiga puluh hari, dan persyaratan sebagaimana diucapkan oleh awal kalimat di atas telah dipenuhi. Untuk pengambilan keputusan di arena permusyawaratan yang melibatkan kehadiran DPP, fraksi partai di MPR dan di DPR, wakil-wakil dari tiap DPW dan wakil-wakil dari tiap DPC, masing-masing dihitung sebagai satu kesatuan dengan satu hak suara.²¹

Di bawah Muktamar dan Muktamar Luar Biasa, Musyawarah Dewan Partai merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam partai yang diselenggarakan oleh DPP, sekurang-kurangnya sekali di antara dua muktamar. Pelaksanaan Musyawarah Dewan Partai bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program dan kebijakan partai serta hal-hal lain yang di anggap perlu oleh DPP. Di samping itu, pengambilan keputusan dapat pula ditentukan melalui penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Penyelenggaranya adalah DPP dengan mengundang DPW Serta fraksi di MPR dan DPR. Selain yang telah disebutkan di atas, pengambilan keputusan di PBB bisa juga dihasilkan oleh Rapat-rapat Dewan Pimpinan atau Majelis Syuro yang dapat dilaksanakan setiap saat yang

²¹ Anggaran Rumah Tangga PBB Bab VII Pasal 25, dikutip dari www.bulan-bintang.org, pada tanggal 30 April 2016.

dianggap perlu, misalnya; rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat majelis syuro/pertimbangan, dan rapat harian.²²

Musyawahar mufakat merupakan langkah pertama yang ditempuh oleh PBB untuk menghasilkan sebuah keputusan. Pemungutan suara hanya akan dilakukan bila musyawarah mufakat tidak berhasil mencapai keputusan. Keputusan partai yang telah ditetapkan baik melalui mekanisme musyawarah mufakat maupun pemungutan suara bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh pihak yang terkait. Sebagai partai Islam, PBB memandang perlu untuk menegaskan bahwa mekanisme pengambilan keputusan partai di semua jenis permusyawaratan harus bersifat haq, adil dan makruf berdasarkan agama Islam, mengandung kemaslahatan bagi partai, anggota, ummat Islam pada khususnya serta rakyat, bangsa dan negara Indonesia pada umumnya.²³

B. Platform Partai

Islam di negeri ini telah berabad-abad lamanya, telah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa kita. Sebab itu, kalau kita berbicara Islam, kita berbicara tentang bangsa Indonesia. Sebaliknya, kalau kita bicara bangsa belum tentu kita

²²Anggaran Rumah Tangga PBB Bab VII Pasal 26, dikutip dari www.bulan-bintang.org, pada tanggal 30 April 2016.

²³Anggaran Rumah Tangga PBB Bab VII Pasal 37, dikutip dari www.bulan-bintang.org, pada tanggal 30 April 2016.

akan bicara Islam. Karena kita mengenal ada dua jenis paham nasionalisme: pertama adalah paham kebangsaan yang dijiwai oleh ajaran Islam yang disebut sebagai nasionalisme Islami atau golongan kebangsaan Islam. Yang kedua adalah golongan kebangsaan sekuler yang tidak menggali paham ajaran-ajaran agama, bahkan dalam praktiknya cenderung memusuhi ajaran-ajaran agama. Kalau di aba-abad yang lalu para pejuang Islam telah mengibarkan bendera Islam dalam melawan penjajahan, mereka sebenarnya tidak berjuang untuk negara lain. Mereka berjuang untuk masyarakat dan bangsa Indonesia.²⁴

Di awal abad ke-20, ketika didirikan Sarekat Islam, mereka menggunakan simbol dan nama Islam. Sarekat Islam pada tahun 1916 sudah tiga juta anggotanya, dari Aceh sampai Ambon. Tidak berlebihan jika Tjokroaminoto pada waktu itu mengatakan bahwa kebangkitan Sarekat Islam adalah kebangkitan bangsa yang jatuh. Itulah sebabnya, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa Partai Bulan Bintang karena berakidah Islam, seolah-olah hanya berjuang untuk umat Islam. PBB berjuang untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia. Platform partai ini adalah keislaman sekaligus keindonesiaan.

Partai politik mempunyai agenda politik yang jelas, yaitu ingin memasuki koridor kekuasaan di negara tertentu. Gerakan

²⁴Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 113.

dakwah sangat luas cakupan dan jangkauannya. Orang berdakwah tidak terbatas pada suatu negara tertentu, orang LSM tidak terbatas pada suatu negara tertentu. Tetapi, kalau partai politik didirikan, jelas wilayah kerjanya hanya di suatu negara tertentu. Arti keislaman sebagai platform adalah yakin sedalam-dalamnya bahwa ajaran Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Bagi PBB, al-Qur'an adalah petunjuk universal bagi umat manusia, penjelasan dan pembeda antara kebenaran dan kesalahan. PBB yakin di dalam al-Qur'an dan Sunnah itu terdapat petunjuk-petunjuk yang universal tentang persoalan-persoalan yang dihadapi manusia.

Di Bidang peribadatan semua itu telah dijelaskan oleh al-Qur'an dan telah dirinci oleh Sunnah Rasulullah SAW. Hanya soal-soal kecil saja yang memerlukan pemikiran dan ijtihad di kalangan ulama-ulama Islam. Sebaliknya agama-agama yang mengurus urusan kemasyarakatan, yang diberitakan al-Qur'an adalah pokok-pokonya saja, prinsip-prinsipnya saja.²⁵ Bahkan dibidang hukum, al-Qur'an yang merupakan syari'ah, hanya dua bidang saja muamalat yang diatur al-Qur'an secara rinci, yaitu bidang hukum perkawinan dan waris. Selain dua bidang ini, bagaimana kita menyusun bidang hukum ekonomi, hukum

²⁵Pidato Politik Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra saat melantik pengurus DPW Jawa Barat, dalam Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, *Ibid.*, hlm. 115.

perbankan, hukum fiskal, UU Negara, UU Lalu Lintas, Hukum Pidana, dan lain-lainnya, terbuka seluas-luasnya untuk berijtihad.

Selain itu, maksud keislaman adalah kita memegang teguh akidah Islamiyah dan kita akan berpolitik berdasarkan prinsip-prinsip akhlak Islamiyah. Bagi kita, politik bukanlah sesuatu yang kotor. Politik bukanlah menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Politik bagi kita harus berdasarkan pada akhlak yang baik. Karena itu, kalau PBB didirikan kemudian ada berbagai macam fitnah, isu, rumor, yang dilontarkan orang terhadap partai ini, jangan diharapkan tokoh-tokoh Bulan Bintang ini akan mencaci maki orang, menghujat-hujat orang. Insya Allah kami tidak mempergunakan cara-cara seperti itu.²⁶

C. Peran PBB dalam Pemilihan Umum

Salah satu tuntutan gerakan reformasi adalah agar dilaksanakan pemilihan umum (Pemilu) yang dipercepat. Hal ini karena wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR/MPR hasil Pemilu 1997 dianggap tidak legitimet dan merupakan kepanjangan tangan rezim Orde Baru. Disamping itu Pemilu 1997 yang memenangkan Golkar merupakan hasil rekayasa rezim Orde Baru yang melakukan manipulasi dan intimidasi. Oleh karena hasil Pemilu 1997 dianggap tidak valid, sebagai gantinya maka perlu

²⁶*Ibid.*

ada Pemilu ulang yang demokratis, jujur, adil, dan luber (langsung, umum, bebas dan rahasia). Berdasarkan hal tersebut, maka keluarlah UU Pemilu 1998 yang mempercepat pelaksanaan Pemilu. Dengan menganut sistem proporsional, Pemilu kemudian ditetapkan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1999. Ada 48 partai politik yang lolos ikut Pemilu 1999. Dari jumlah tersebut, 17 diantaranya adalah partai politik Islam, termasuk PBB didalamnya.²⁷

Hasil pemilu 1999 yang menunjukkan kekalahan atau kegagalan partai-partai Islam tersebut sangat menarik mengingat mayoritas pemilih 90% adalah umat Islam. Kekalahan atau kegagalan partai-partai Islam pada Pemilu ini menarik pula karena terjadi pada sikap antusiasme para pemimpin Islam yang sangat percaya diri akan kemampuan merebut suara mayoritas dari penduduk negeri ini. Ini terlihat dari keyakinan para pemimpin partai yang masing-masing mengklaim akan mendapat dukungan yang banyak dari umat Islam. Pada Pemilu tahun tersebut, Partai Bulan Bintang mampu meraih 2.049.708 suara atau sekitar 1,94% dan meraih 13 kursi DPR RI. Dari ke 17 partai Islam yang ikut Pemilu, hanya PPP (58 kursi) dan PBB (13 kursi) yang lolos *electoral threshold*. Sedangkan yang lainnya, yaitu sebanyak 15 partai Islam tidak lolos *electoral threshold*.

²⁷ Lili Romly, *Op.Cit.* hlm. 137.

Euforia Pemilihan Umum 1999 sudah berlalu, partai-partai besar kembali berpikir menghadapi pemilihan umum berikutnya pada 2004. Namun yang terjadi justru tidak berjalan sesuai dengan keinginan masing-masing partai. Sebagai partai lama, minimal peserta pemilu 1999, solidaritas internal yang seharusnya dipertahankan malah tidak terwujud. Hampir semua partai besar mengalami konflik.²⁸ Partai Bulan Bintang (PBB) yang merupakan perpanjangan tangan kelompok Masyumi ini mengalami permasalahan yang hampir mirip seperti apa yang dialami oleh PKB, yakni munculnya dua kubu yang sama-sama mengklaim sebagai pengurus PBB yang sah. Ketika itu, Hartono Mardjono dan Yusril Ihza Mahendra berseteru tentang sah dan tidaknya pelaksanaan muktamar yang dilakukan oleh partai tersebut. Puncaknya, Hartono Mardjono menyatakan keluar dan memilih bergabung bersama Fraksi Perserikatan Daulah Ummah, yang merupakan gabungan dari beberapa partai Islam kecil.

Agaknya, fenomena perpecahan dalam internal parpol adalah sesuatu yang harus terjadi di era transisi. Perselisihan politik yang sebenarnya sah-sah saja dalam iklim demokrasi berlangsung semakin tidak kondusif untuk perjalanan bangsa yang sedang tertatih-tatih mengatur langkahnya, pada dasarnya mengajak rakyat untuk sadar politik. Melalui partai politik pula

²⁸Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 57.

hak-hak berpolitik warga negara dapat disalurkan dengan baik. Namun ternyata, hal itu hanya idealitas belaka. Partai politik dalam praktiknya justru hanya menjadi kendaraan politik untuk mengantarkan elit partai menuju kursi kekuasaan, di dalam mana aspirasi konstituen jarang disalurkan. Demikian pula yang terjadi pada parpol-parpol di Indonesia menghadapi Pemilu 2004. Mereka harus dihadapkan pada gesekan politik yang terjadi dalam parlemen antara sesama parpol di satu sisi, di sisi lain mereka juga dipusingkan dengan persiapan bagaimana memenangkan Pemilu 2004. Apalagi dalam pemilu tersebut, presiden dan wakilnya akan dipilih secara langsung oleh rakyat.²⁹ Dan pada Pemilu 2004, PBB meraih suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62%) yang menjadikan partai ini mendapatkan jatah 11 kursi di DPR. Pada Pemilu 2009 dan 2014, partai ini tidak mampu berbuat banyak. Pemilu 2009, PBB hanya mampu mengantongi suara sekitar 1,8 juta (1,7%), sementara Pemilu 2014 ternyata perolehan suara turun di 0,91% yang berarti tidak memenuhi *Parliamentary Threshold* 2,5% sehingga tidak mendapatkan kursi di tingkat nasional.³⁰

²⁹ *Ibid.*, hlm. 59.

³⁰ Hasil Pemilu, dikutip dari <http://www.kpu.org/page/hasilpemilu>., pada tanggal 2 Mei 2016.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN MOHAMMAD NATSIR TENTANG PARTAI POLITIK ISLAM DALAM IDEOLOGI PBB

A. Pokok-pokok Pemikiran Mohammad Natsir dalam Politik Partai Islam

Mohammad Natsir telah mewariskan pemikiran yang terus akan dibicarakan. Meskipun gagasan yang ditinggalkannya begitu beragam, meliputi persoalan kebangsaan, pendidikan, dakwah, keagamaan, dan sebagainya, masyarakat akan lebih menekankan perhatiannya pada politik. Pemikiran dan aktivismenya di negeri ini menjadikan dirinya sebagai salah seorang pengemuka politik Islam. Sebanding dengan masalah pokok yang terus dihadapi Islam politik, banyak orang yang akan teringat pada Natsir ketika berbicara mengenai hubungan antara agama yang di anut mayoritas penduduk negeri ini dan kehidupan politik sehari-hari.¹

Tak jelas apa yang mendorong Natsir memasuki wilayah politik. Mungkin sama yang dialami Soekarno, Hatta, Sjahrir, Wahid Hasyim, dan tokoh-tokoh pergerakan lainnya bahwa zaman lah yang telah memanggil mereka. Kolonialisme yang berkepanjangan, semangat nasionalisme yang mulai berkobar, serta bayang-bayang kemerdekaan yang bakal hadir adalah

¹ Bahtiar Effendy, "Mohammad Natsir", dalam Seri Buku Tempo, *Op.Cit.*, hlm. 148.

faktor-faktor yang menyebabkan mereka berpolitik. Seperti yang tercermin dalam rumusan kata pembuka Undang-Undang Dasar 1945, sekedar untuk bersikap konsisten terhadap apa yang mereka yakini bahwa penjajahan memang harus dilenyapkan dan kemerdekaan merupakan hak segala bangsa.

Berbeda dengan para pendiri republik di Eropa atau Amerika, yang tidak harus peduli akan tempat agama dalam negara, para pendiri republik kita, termasuk Natsir, dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa agama merupakan realitas yang hidup. Agama telah menjadi bagian dari sistem sosial dan budaya masyarakat. Hingga pada tingkat tertentu, agama telah berperan sebagai sumber inspirasi dan alat mobilisasi dukungan untuk melawan penjajahan.

Karena itu, mereka dipaksa berfikir keras mengenai posisi dan peran sesuai bagi agama dalam negara-bangsa (*nation-state*) yang mereka bangun itu. Dalam hal ini, sejak awal Natsir cenderung meletakkan kata sifat agama di belakang negara. Untuk itu, bagi Natsir, nasionalisme Indonesia mestilah “kebangsaan muslimin”. Ini konsisten dengan pandangannya mengenai Islam sebagai dasar negara, Islam sebagai ideologi. Di sinilah Natsir berbeda dengan Soekarno, yang sering mengutip paham Ataturisme dan Kemalisme ketika berbicara mengenai hubungan antara agama dan negara. Ketika Soekarno

mengampanyekan paham pemisahan antara agama dan negara, Natsir menolaknya. Menurut dia, selain alasan teologis di atas, sekularisme mengingkari kenyataan sosiologis masyarakat, karena agama telah menjadi sebuah kenyataan hidup.

Natsir dalam memperjuangkan Islam politik di dalam bukunya *Fiqhud Da'wah*, mengutip al-Qur'an surat al-Imran ayat 110 yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

*“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.*²

Sebagian besar karena pandangan ideologis ini, Natsir sering disalah pahami. Banyak orang yang menganggap aktivisme dan pemikirannya penuh pertentangan, tidak pas dengan konteks kemajemukan paham keagamaan di negeri ini. Perdebatannya yang luar biasa kerasnya dengan Soekarno

²Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm.

mengenai soal kebangsaan (didasarkan pada agama atau bukan), dengan lawan politiknya di Dewan Konstituante tentang dasar negara (Islam atau Pancasila), telah membuat sebagian orang mengkategorikannya sebagai “golongan agama”. Ini merupakan sebuah pengolongan ideologi politik yang dikenakan kepada mereka, termasuk sebagian bapak pendiri republik kita, yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.

Pandangan Natsir tentang negara Islam atau negara berdasarkan Islam menurutnya merupakan dasar yang tidak mungkin salah, seperti dasar filosofis yang dibuat oleh manusia. Pandangan ini juga memiliki argumen bahwa hukum yang harus ditaati adalah hukum yang berasal dari Tuhan, karena Tuhanlah yang maha benar, bukan manusia. Oleh karenanya, hukum yang dibuat manusia sangat mungkin bertentangan hukum Tuhan karenanya bisa ditolak. Islam dan hukum Islam tidak demikian karena itu harus menjadi pedoman wajib umat Islam.

Tapi sesungguhnya Natsir tidak hanya berbicara mengenai Islam sebagai dasar negara atau persatuan antara agama dan negara. Ia juga berbicara mengenai modernisme, demokrasi, hak asasi manusia, dan persamaan hak serta rasisme sebagai monster kemanusiaan dan peradaban. Kombinasi kesempatan yang dimilikinya untuk mengenyam pendidikan Barat dan mempelajari Islam telah memungkinkannya

melahirkan pemahaman Islam modern. Melalui partai yang dipimpinnya, Masyumi, ia memperjuangkan itu semua.³

Pada zamannya, ia juga menjadi kampiun demokrasi dan penghormatan atas hak asasi manusia. Ketika para nasionalis Jawa, baik yang tergabung partai besar maupun kecil, menginginkan pemilihan umum tidak langsung, Natsir justru memperjuangkan yang sebaliknya. Demikian juga ketika hak asasi menjadi momok sebagian anggota Dewan Konstituante, Natsir justru ikut memperjuangkannya menjadi pasal-pasal penting dalam Undang-Undang Dasar yang sayangnya tak jadi disahkan itu.

Inilah warisan Natsir yang entah karena apa tak banyak dikutip orang. Nasibnya mirip Masyumi, partai yang hampir-hampir identik dengan dirinya. Partai ini lebih sering dinilai sebagai pejuang Islam sebagai dasar negara ketimbang kampiun demokrasi dan hak asasi manusia. Seperti ditulisnya dalam *Pembela Islam*, edisi Januari-Maret 1932, Natsir pemegang teguh paham “*lillah* dasar usaha kita, *illallah* arah tujuan kita”. Gagasannya mengenai pemerintah yang demokratis dan yang menghormati hak asasi manusia adalah interpretasi modern Natsir atas Islam.

³Seri Buku Tempo, *Op.Cit.*, hlm. 151.

Kalau saja Natsir sempat menuliskan gagasannya mengenai Islam sebagai ideologi negara secara lebih panjang, mungkin kolega politiknya akan lebih jelas memahami duduk soalnya. Demikian pula, jika saja kita semua bersedia melihat Natsir dalam kerangka Islam dan demokrasi, Islam dan hak asasi manusia, barangkali ketakutan atas paham Natsir tak perlu muncul. Sayangnya, kita lebih terbawa oleh angin sentimen ideologi Islam versus Pancasila. Padahal Natsir tidak selalu memosisikan keduanya secara diametral.

Dalam tulisan Mohammad Natsir di harian *Abaditanggal* 9, 10, 12 November 1956, Natsir mengemukakan cita-cita politik Islam dalam partai Masyumi.⁴*Pertama*, membebaskan manusia dari rasa takut kecuali kepada Allah Sang Maha Pencipta, serta menjalankan segala perintah-perintah-Nya agar kebebasan rohani manusia dapat dimenangkan. *Kedua*, untuk mencapai maksud-maksud tersebut, segala macam tirani, eksploitasi manusia, dan kemiskinan harus dihapuskan. *Ketiga*, memerangi chauvinisme yang merupakan akar intoleransi dan permusuhan di antara warga masyarakat. Secara demikian, kita semua wajib membangun masyarakat di mana martabat manusia diakui secara penuh. *Keempat*, Natsir yakin bahwa Islam mengajarkan cita-cita politik yang sangat luhur, dan dalam kenyataannya umat Islam Indonesia

⁴Musa Khazim dan Alfian Hamzah, *Op., Cit.*, hlm. 101.

telah memperjuangkan cita-cita untuk membangun masyarakat yang bebas dari chauvinisme, tirani, dan eksploitasi. *Kelima*, untuk mencapai tujuan politik tersebut, konteks situasional dan kondisional yang dihadapi harus diperhatikan, berhubung cara-cara perjuangan harus diselesaikan dengan konteksnya.

Dan mereka yang mengaku ahli waris Natsir, ahli waris Masyumi, baik pada awal Orde Baru maupun pemerintah Soeharto tumbang, tak kunjung memperjelas gagasan yang diwarisnya itu. Alih-alih memperjelas *platform* ideologi dan politik partai ini, mereka hanya berteduh di bawah kebesaran Masyumi.

B. Kontribusi Pemikiran Mohammad Natsir tentang Ideologi Partai Politik Islam bagi Pengembangan PBB

Kekalahan partai-partai berasas Islam dalam setiap pemilihan umum pasca reformasi benar-benar telak. Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengklaim diri atau dapat disebut reinkarnasi Masyumi dan meminjam lambang bulan bintangnya untuk nama partai dalam pemilihan umum 1999 hanya menempati 13 kursi, atau hanya meraih tiga kursi lebih banyak dari ambang penalti *threshold*. Setelah hampir setengah abad berlalu, kejayaan Masyumi dan wajah Islam modern demokrat yang ditampilkannya secara mengesankan, ternyata tak sanggup

lagi memikat hati para pemilih dari bilik suara partai-partai nasionalis-sekuler seperti PDI-P dan Golkar.⁵

Dengan hanya bermodal 13 kursi di DPR-RI, upaya Fraksi Bulan Bintang untuk meloloskan keputusan politik memang seringkali mentok. Sebagai contoh, saat Sidang Tahunan (ST) MPR yang dilaksanakan pada tanggal 10-18 Agustus 2000, PBB berupaya agar Piagam Jakarta dimasukkan kembali dalam Mukadimah UUD 1945, ketika proses amandemen, namun tidak membuahkan hasil.⁶

Pada saat itu, ada tiga alasan yang dikemukakan oleh PBB mengenai usulan memasukkan kembali Piagam Jakarta dalam Pasal 29 UUD 1945. *Pertama*, usulan tersebut hanyalah konsistensi dan wujud pelaksanaan amanah pendahulu negeri ini, pada saat diberlakukannya UUD ini dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959, di mana dalam diktum dekrit tersebut ditegaskan bahwa Piagam Jakarta adalah menjiwai dan merupakan bagian tak terpisahkan dari UUD 1945. Untuk itu penambahan tujuh kata dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 hanyalah semata-mata penjabaran dari maksud pemberlakuan UUD 1945 itu. *Kedua*, ajaran agama manapun, khususnya syari'at agama Islam mengajarkan dan memerintahkan kebaikan. Islam mengajarkan

⁵ Hamid Basyaib (eds.). "Pengantar", dalam Deliar Noer, (et. al.), *Mengapa Partai Islam Kalah*, Jakarta: Alvabet, 1999.

⁶ Idris Thaha (ed.), *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 157.

akhlak yang mulia, larangan berbuat kejahatan dan kerusakan di muka bumi, penghormatan kepada penganut agama dan bangsa lain dan segala hal yang mengenai kebaikan. Untuk itu bangsa Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam akan lebih baik jika benar-benar memahami dan menjalankan ajaran agamanya. *Ketiga*, tidak ada maksud untuk memberlakukan syari'at Islam ini kepada mereka yang tidak memeluk agama Islam, dan tidak ada maksud untuk menyingkirkan serta memarjinalkan ajaran dan penganut agama-agama lainnya di negara ini. PBB memberikan jaminan bahwa agama lain akan bebas hidup di negeri ini, jaminan ini bukan hanya dari PBB sendiri, melainkan jaminan dari ajaran dan syari'at agama Islam itu sendiri.⁷

Usulan-usulan di atas merupakan sebuah perjuangan PBB dalam memasukkan nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan. Hal ini tentunya mengingatkan kita kembali pada sidang BPUPKI, ketika itu terjadi perdebatan antara tokoh Islam dengan tokoh nasionalis mengenai tujuh kata dalam perumusan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945. Meskipun Natsir bukan termasuk di dalam Panitia Sembilan, namun usulan-usulan tersebut tidak lepas dari pergulatan politik Natsir yang lebih dulu menyuarakan dan memperjuangkan agar

⁷Lili Romli, *Op.Cit.*, hlm. 203.

nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam masuk dalam konstitusi Indonesia.

Demi tegaknya syari'at Islam di negara yang penduduknya mayoritas muslim tidak salah jika Natsir berupaya untuk memperjuangkannya, dengan tetap meyakinkan akan jaminan kebebasan beribadah terhadap pengikut agama lain. Natsir tidak mengharapkan negara Indonesia menjadi negara Islam, namun ia hanya menginginkan agar diterapkannya syari'at Islam dalam konstitusi negara. Seperti kita ketahui bahwa di masa transisi atau pasca reformasi, secara konsepsional, PBB tetap memperjuangkan syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti halnya menjunjung tinggi kemajemukan. Syari'at Islam dalam arti peribadatan, seperti sholat, puasa dan haji dapat dilaksanakan umat Islam seluas-luasnya, tanpa sedikitpun kewenangan negara untuk mencampuri atau menghalanginya. Syari'at Islam dalam kehidupan pribadi dan keluarga, seperti perkawinan dan kewarisan dijamin untuk dilaksanakan bagi umat Islam juga tunduk kepada ketentuan-ketentuan agama. Sedangkan konsep Syari'at yang diperjuangkan PBB dalam kehidupan yang lebih luas, berkaitan dengan hukum publik, ialah sumber hukum yang universal, yang dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional atau peraturan di daerah-daerah. Kalau sudah selesai

ditransformasikan, maka namanya bukan lagi syari'at Islam, melainkan hukum nasional Republik Indonesia.

Dengan berasaskan Islam dan menimba inspirasi dan motivasi yang seluas-luasnya dari ajaran Islam yang universal itu, PBB akan terus berjuang membela tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. PBB tidak ada niat mengubah nama negara kita menjadi Republik Islam Indonesia, namun Partai ini memperjuangkan ajaran-ajaran Islam yang universal, yang menjiwai dan menyemangati kehidupan bangsa dan negara, dengan menjunjung tinggi dan menghormati keberadaan pemeluk-pemeluk agama lainnya. Sesuai dengan jaminan ajaran Islam tentang kemerdekaan memeluk agama dan menjalankannya, yang semuanya adalah sejalan dengan ketentuan-ketentuan di dalam UUD 1945.

PBB memang bukanlah partai berasaskan Islam satu-satunya di Indonesia, namun dengan semangat perjuangannya dalam menegakkan konstitusi Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam, membuat partai ini memang tidak lepas dari pengaruh ide-ide Natsir dalam memperjuangkan dasar negara Indonesia. Sesuai dengan asa-asa Islam, konstitusi menjamin hak-hak asasi semua warga negara, tanpa perbedaan agama atau kepercayaan. Hal ini menunjukkan kepada dunia bahwa sesungguhnya agama Islam bukanlah semata-mata janji-janji

akan hidup bahagia di akhirat. Islam meletakkan dasar akhlak yang baik, dasar toleransi yang positif terhadap pemeluk-pemeluk agama lain.

Partai ini dalam tafsir asas mengutip al-Qur'an surat ar-Rum ayat 30, secara eksplisit menyebutkan:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.⁸

Islam adalah *agama fitrah* yang diturunkan Allah bersesuaian dengan *iradah-Nya* dalam menciptakan manusia. Karena itu ajaran-ajaran Islam merupakan sebuah sistem pedoman dan tuntunan hidup yang *komprensif* dan *munasabah* (relevan) dengan keutuhan seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Manusia dituntut menghadapkan dan mengarahkan hidupnya untuk menegakkan Islam seutuhnya.⁹

⁸Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama, *Loc.Cit.*, hlm. 407.

⁹ Tafsir Asas Partai Bulan Bintang dikutip dari www.bulan-bintang.org/page/tafsirasas.. pada tanggal 22 Mei 2016, hlm. 9.

Sebagaimana diketahui, PBB didirikan sebagai upaya meneruskan kembali roh, spirit dan cita-cita yang pernah dibangun Masyumi. Dalam sejarahnya, Masyumi dan tokoh-tokohnya pernah berjaya dan memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Natsir merupakan pemimpin Masyumi terlama, beliau dikenal tidak hanya karena sikap egalitariannya, moralis, intelek, istiqomah, demokratis, tetapi beliau termasuk kelas negarawan, bukan politikus semata. Nuansa harmonis yang berkembang dan dibudidayakan Natsir dalam Masyumi juga dapat pula dirasakan dalam PBB saat ini, kendati sebagian besar pengurus partai berasal dari sesepuh, dan penasihat partai adalah tokoh-tokoh ulama, kiai kharismatis, yang tingkat ketokohnya umumnya tidak dapat diragukan lagi. Penggabungan dua potensi besar ini pada akhirnya akan melahirkan sinergi yang menumbuhkan kinerja yang sangat baik bagi pengembangan PBB.

Meskipun sejarah berdirinya partai ini didukung banyak ormas Islam dan organisasi dakwah, serta mantan tokoh-tokoh Masyumi, namun dalam perjalanan politik, partai ini tidak banyak memperoleh suara, bahkan Pemilu tahun 2014 kemarin, PBB tidak punya wakil dewan di kursi DPR-RI. Kekalahan atau kegagalan partai berasaskan Islam dalam panggung politik Indonesia disebabkan beberapa faktor. *Pertama*, keberanian

mereka untuk berjuang dengan *platform* Islam itu. Dua generasi selama dua dekade nyaris berlalu di mana Islam sebagai kekuatan politik telah dilumpuhkan, yakni sejak dibubarkannya Masyumi di tahun 1962 dan dikeluarkannya Dekrit Presiden Juli 1959 tiga tahun sebelumnya untuk kembali kepada UUD 1945 dan kekuasaan absolut berada di tangan presiden. Ada ketakutan dan kerisihan terhadap Islam sebagai kekuatan politik yang dihidupkan kembali, karena Islam sebagai kekuatan politik selalu diidentikkan dengan gerakan-gerakan DI-TII di masa lalu, serta gerakan-gerakan teroris dan militan lainnya dari dunia Islam lain dengan yang dihembus-hembuskan oleh pers Barat, padahal gerakan mereka tidak lebih dari gerakan menuntut kemerdekaan seperti yang berlaku di belahan bumi manapun.¹⁰

Kedua, perbedaan-perbedaan berarti dalam hal asas, tujuan, dan program-program antara sesama partai Islam itu hampir tidak terlihat, sehingga sulit bagi kelompok umat di kelas awam untuk menjatuhkan pilihannya kepada partai-partai Islam itu. Hubungan-hubungan emosional secara primordial pada akhirnya lebih menentukan.

Ketiga, tentu saja adalah uang. Perolehan suara dengan tingkat kemenangan yang diperoleh partai-partai yang bertarung berbanding sejajar dengan jumlah dana yang mampu mereka

¹⁰Mochtar Naim, "Kekalahan Partai Politik Islam" dalam Deliar Noer, (et. al.), *Op.Cit.*, hlm. 173.

gaet. Partai-partai Islam secara keseluruhan adalah dari antara partai yang miskin dan tidak punya dana, mereka mencukupkan saja dari dana yang ada.

Keempat, kecenderungan egosentrisme para pemimpin partai Islam yang lebih suka melihat perbedaan daripada persamaan di antara sesama mereka. Betapapun tingginya tingkat pendidikan mereka dan luasnya pergaulan mereka, namun sisa-sisa arogansi budaya feodalisme dan aristokratisme masih terbawa dalam cara hubungan sosial di antara mereka, dimana emosi dan sentimen kadang lebih menonjol dari pertimbangan rasional yang dingin.¹¹

Asas Islam dalam PBB membuat partai ini tidak bisa menarik massa serta kader dari berbagai latar belakang agama masuk di dalamnya. Sementara keberadaan dua ormas besar, NU dan Muhammadiyah yang masing-masing telah menjadi basis massa PKB dan PAN, menjadikan PBB sulit mendapat dukungan suara dari umat Islam. Bagi saya, sebuah partai harus berjiwa inklusif, pluralis, dan universal. Partai itu harus bisa dipakai oleh siapapun juga, dari suku manapun, agama apapun yang di anutnya, dan dari manapun kelompoknya sehingga dinamika partai akan terus menerus dibangun dan berusaha membenahi diri di dalam proses kritik. Ini merupakan sebuah cerminan bagi

¹¹*Ibid.*, hlm. 174.

partai sekarang dan yang akan datang. Seharusnya PBB belajar dari kegagalan-kegagalan sebelumnya dengan salah satu cara mengubah asas partai menjadi terbuka. Hal ini di maksudkan supaya partai ini tidak lagi mengkhususkan umat Islam dan menerima keanggotaan dari golongan agama manapun. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa era sekarang ini umat Islam Indonesia lebih pintar dalam memilih mana partai yang benar-benar memperjuangkan dan menanamkan nilai-nilai Islam daripada hanya dengan menggunakan simbol atau nama Islam semata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pokok-pokok pemikiran Mohammad Natsir tentang ideologi partai politik Islam adalah bahwa ajaran-ajaran Islam dipandang perlu dalam mengatur seluruh masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim. Selain mengatur tentang kenegaraan, Islam merupakan agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Islam sangat fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, selama prinsip-prinsip pemikiran dalam Islam tetap bisa dipertahankan. Sementara untuk penerapan syari'at Islam dalam negara, maka sebuah negara harus dipimpin oleh seorang Muslim. Oleh karena itu diperlukan pemimpin muslim yang mampu memahami masyarakat bahwa Islam tidak sekedar urusan ritual semata.
2. Kontribusi pemikiran Mohammad Natsir tentang ideologi partai politik Islam dalam pengembangan PBB ialah memperjuangkan syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta menjunjung tinggi kemajemukan. PBB ingin memperjuangkan ajaran-

ajaran Islam yang universal, dengan tetap menjunjung tinggi dan menghormati keberadaan pemeluk-pemeluk agama lain. Dengan memberikan jaminan bahwa agama lain akan bebas hidup di negeri ini, jaminan ini sebenarnya bukan hanya dari PBB sendiri, melainkan dari ajaran dan Syari'at Islam itu sendiri. Hal ini tidak dapat di pisahkan dengan ide-ide Natsir dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. PBB yang awal berdirinya didukung banyak oleh tokoh-tokoh BKUI yang notabennya ialah mantan pendukung Masyumi benar-benar menginginkan partai ini untuk menjadi penerus partai yang jaya di awal kemerdekaan negeri ini. Hal ini tak lepas dari kedekatan pemimpin partai Yusril Ihza Mahendra dengan Natsir, dua tokoh berbeda generasi namun memiliki satu kesamaan. Yakni sama-sama memperjuangkan nilai-nilai Islam dimasukkan dalam konstitusi Indonesia.

B. Saran-saran

Beberapa saran yang mungkin bermanfaat sebagai masukan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya PBB merubah asas partai yang dari Islam menjadi Islam dan Pancasila, bagaimanapun juga ini penting guna menarik pemilih dari berbagai kalangan dan latar belakang keagamaan.

2. Diharapkan PBB untuk mencalonkan ulama dari kalangan mana saja yang benar-benar punya integritas tinggi guna mengembalikan kepercayaan rakyat tentang sosok pemimpin yang benar-benar melindungi dan mengayomi.
3. Diharapkan kader PBB terjun ke masyarakat untuk mendengarkan apa keluhan dan aspirasi mereka guna mensejahterakan masyarakat.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah, skripsi ini berhasil diselesaikan. Dengan keterbatasan yang ada, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, dan juga masih banyak kekurangan. Namun kekurangan tersebut bukan berarti penulis lepas tanggungjawab secara ilmiah. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirnya semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan pertolongan pada hamba-Nya. Amin, sekian dan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Amir, Zaenal Abidin, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*, Jakarta: LP3ES, 2003.
- Aziz, Abdul, *Islam Politik: Pergulatan Ideologi PPP Menjadi Partai Islam*, Tiara Wacana: Yogyakarta, 2006.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hakim, Lukman, (ed), *M. Natsir di Panggung Sejarah Republik*, Jakarta: Panitia Peringatan Refleksi Seabad M. Natsir, 2008.
- _____, *Perjalanan Mencari Keadilan dan Persatuan: Biografi Dr. Anwar Harjono, S.H*, Jakarta: Media Da'wah, 1993.
- Hassan, Sahar L. et al., *Memilih Partai Islam: Visi, Misi, Persepsi* (Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Kamil, Sukron, *Islam dan Politik di Indonesia Terkini*, Jakarta: Pusat Studi Indonesia dan Arab, 2013.

- Kazhim, Musa dan Hamzah, Alfian, *5 Partai Dalam Timbangan*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama, *Mushaf al-Mumtaaz*, Jakarta: Mumtaaz Media Islami, 2007.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Madinier, Remy, *L'Indonesie, entre Democrate musulmane et Islam integral, Histoire du Parti Masjumi*, Tonny Pasuhuk, Terj. "Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral", Jakarta: Mizan, 2013.
- Mahendra, Yusril Ihza, "Mohammad Natsir dan Sayyid Abul A'la Maududi: Telaah Tentang Dinamika Islam dan Transparansinya ke dalam Ideologi Sosial dan Politik", dalam *Pemikiran dan Perjuangan Natsir*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2010.
- Natsir, Mohammad, *Dunia Islam dari Masa ke Masa*, Jakarta: Panji Masyarakat, 1981.
- _____, *Fiqhud Da'wah*, Semarang: Yayasan Kesejahteraan Pemuda Islam Surakarta dan Ramadahani, 1981.
- _____, *Islam dan Kristen di Indonesia*, Jakarta: Media Da'wah, 1983.

- _____, *Islam Sebagai Dasar Negara*, Bandung: Segarsy, 2014.
- _____, *Kebudayaan Islam dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: Gimukti Pasaka, 1988.
- _____, *World of Islam Festival*, Jakarta: Media Da'wah, 1985.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. ke 10, 2014.
- Noer, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta: Garafitipers, 1987.
- _____, dkk. *Mengapa Partai Islam Kalah*, Jakarta: Alfabeta, 1999.
- Qodir, Zuly, *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.
- Romly, Lily, *Islam Yes, Partai Islam Yes*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006.
- Saefuddin, Didin, *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam: Biografi Intelektual 17 Tokoh*, Jakarta : Grasindo, 2003.
- Salim, Hairus (eds), *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, Yogyakarta: LKiS dan CH-PPS, 1999.
- Strauss, Anselm & Corbin, Juliet, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Tahqiq, Nanang (ed.), *Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Tebba, Sudirman, *Islam Menuju Era Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.

Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Thaha, Idris, *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

SKRIPSI

Syukron, Achmad, *Pandangan Muhammad Natsir Tentang Demokrasi dan Kontribusinya Terhadap Dinamika Politik Partai Masyumi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2005.

MEDIA INTERNET

<http://www.bulan-bintang.org>.

<http://www.kpu.org>.

<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1840>.

Partai Bulan Bintang

Partai Bulan Bintang	
Ketua	Yusril Ihza Mahendra
Sekretaris jenderal	BM Wibowo Hardiwardoyo
Didirikan	17 Juli 1998
Kantor pusat	Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Ideologi	Islam
Kursi di DPR (2014)	-

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebuah partai politik Indonesia berasaskan Islam dan menganggap dirinya sebagai partai penerus Masyumi yang pernah jaya pada masa Orde Lama. Partai Bulan Bintang didirikan pada 17 Juli 1998.

Visi:

Terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami

Misi:

Membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.

Latar belakang

Partai Bulan Bintang telah ikut pemilu selama empat kali yaitu pada Pemilu tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. Pada Pemilu tahun 1999, Partai Bulan Bintang mampu meraih 2.050.000 suara atau

sekitar 2% dan meraih 13 kursi DPR RI. Sementara pada Pemilu 2004 memenangkan suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62%) dan mendapatkan 11 kursi di DPR.

Partai ini sebelumnya diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra, tokoh yang pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara di masa Presiden SBY, Tokoh ini mempunyai ciri tahlalat di wajahnya dan dikenal sebagai tokoh yang memelopori Amandemen Konstitusi Pasca Reformasi, di tengah tuntutan Federalisme dari beberapa tokoh. Berikutnya MS Kaban dipilih sebagai ketua umum pada 1 Mei 2005. MS Kaban ketika itu menjabat Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I.

Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2009, partai ini memperoleh suara sekitar 1,8 juta yang setara dengan 1,7% yang berarti tidak mampu meraih perolehan suara melebihi parliamentary threshold 2,5% sehingga berakibat pada tidak memiliki wakil seorang pun di DPR RI, meski di beberapa daerah pemilihan beberapa calon anggota DPR RI yang diajukan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Anggota DPR RI. Dalam pemilu legislatif 2014, PBB meraih suara sebesar 1 sampai 2 persen yang dianggap tidak lolos bersama PKPI.

Namun, partai yang memperjuangkan syari'at Islam masuk dalam sistem hukum di Indonesia sebagai icon perjuangannya ini, masih memiliki sekitar 400 Anggota DPRD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Sejak Muktamar ke-3, April 2010, di Medan partai ini telah menetapkan kembali MS Kaban sebagai Ketua Umum Sedangkan BM Wibowo Hadiwardoyo mantan Sekjen Organisasi massa Islam Hidayatullah diangkat sebagai Sekretaris Jenderal dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc. sebagai Ketua Majelis Syura sedangkan DR. Fuad Amsyari sebagai Ketua Dewan Kohormatan Partai.

Partai ini kemudian diloloskan KPU sebagai peserta pemilu 2014 dan mendapat nomor urut 14. Pada 26 April 2015, Yusril Ihza Mahendra terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang di Muktamar IV PBB menggantikan MS Kaban. Ia terpilih terpilih secara aklamasi setelah calon lainnya Rhoma Irama tidak datang ke arena muktamar pada pemilihan ketua umum.

Susunan Pengurus

Berikut merupakan susunan pengurus Partai Bulan Bintang periode 2015 - 2020

Ketua Umum : Yusril Ihza Mahendra

Ketua Harian : Jamaluddin Karim

Ketua Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Infrastruktur Partai:

Dwianto Ananias

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan: Muhanto

Ketua Bidang Hubungan dan Kerjasama dan Luar Negeri: Taufik Rahman

Ketua Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah: Yusuf Khasani

Ketua Bidang Komunikasi dan Informatika : Harjono Padmono
Putro

Ketua Bidang Hukum dan HAM : Fachmi

Ketua Bidang Politik dan Pembangunan Daerah : Afriansyah Noer

Ketua Bidang Pemuda dan Mahasiswa : Abdul Halim

Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Perempuan :
Ramdhiana Nuzul Qadrina

Ketua Bidang Keadilan Ekonomi dan Pembangunan : Mawardi
Abdullah

Ketua Bidang Lingkungan Hidup, Maritim, dan Infrastruktur :
Nawawi Lubis

Ketua Bidang Pendidikan dan Aksi Sosial Masyarakat :
Zulkifli

Ketua Bidang Pengembangan Wakaf Zakat dan Sadaqah : Henry
Tanjung

Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral : Achmad
Bachtiar Amin

Sekretaris Jenderal : Jurhum Lantong

Sejarah Singkat

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebuah partai politik Indonesia yang berasaskan Islam_berdiri pada tanggal 17 Juli 1998 di Jakarta dan dideklarasikan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar Kemayoran Baru Jakarta.

Partai Bulan Bintang didirikan dan didukung oleh ormas-ormas Islam tingkat Nasional yaitu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Koordinasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), Forum Silaturahmi Ulama, Habaib dan Tokoh Masyarakat (FSUHTM), Persatuan Islam (PERSIS), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Umat Islam (PUI), Perti, Al-Irsyad, Komite untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Lembaga Hikmah, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Pemuda Islam (GPI), KB-PII, KB-GPI, Hidayatullah, Asyafiiyah, Badan Koordinasi Pemuda & Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia (Bakomubin), Wanita Islam, Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI), Ittihadul Mubalighin, Forum Antar Kampus dan Lembaga Penelitian Pengkajian Islam (LPPI). Berbagai ormas ini bergabung didalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang didirikan pada tanggal 12 Mei 1998. BKUI merupakan pelanjut dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1989 oleh Pemimpin Partai Masyumi yaitu DR.H. Mohammad Natsir, Prof.DR.HM. Rasyidi, KH. Maskur, KH. Rusli Abdul Wahid, KH. Noer Ali, DR. Anwar Harjono, H. Yunan Nasution, KH. Hasan Basri dan lain-lain.

Pada awal berdirinya PBB diketuai oleh Prof.DR. Yusril Ihza Mahendra, SH,MSc tokoh reformasi yang menjadi arsitek berhentinya Soeharto dari jabatan Presiden RI ketika reformasi bergulir dan juga sebagai tokoh yang memelopori Amandemen Konstitusi Pasca reformasi ditengah tuntutan Federalisme dari berbagai tokoh reformasi ketika itu dan pernah pula menjadi Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Menteri Sekretaris Negara.

Sedangkan DR. H.MS. Kaban diangkat sebagai Sekretaris Jenderal, tokoh HMI yang sangat disegani dan pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan yang juga dikenal tanpa kompromi dengan para cukong kayu dan perambah hutan Indonesia.

Berikutnya MS Kaban dipilih sebagai Ketua Umum PBB pada tanggal 1 Mei 2005 dan Drs.H. Sahar L. Hasan sebagai Sekjen. Sejak Muktamar ke-3, April 2010, di Medan partai ini telah menetapkan kembali DR.H.MS Kaban sebagai Ketua Umum dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc. sebagai Ketua Majelis Syuro dan BM Wibowo,SE., MM., mantan Sekretaris Jenderal Organisasi Massa Islam Hidayatullah, sebagai Sekretaris Jenderal.

Partai Bulan Bintang sejak reformasi telah menjadi peserta pemilu dan telah mengikuti Pemilu tahun 1999, 2004 dan Pemilu tahun 2009. Pada Pemilu tahun 1999, Partai Bulan Bintang mampu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2% dan meraih 13 kursi DPR RI. Sementara pada Pemilu 2004 memenangkan suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62%) dan mendapatkan 11 kursi di DPR.

Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2009, PBB memperoleh suara sekitar 1,8 juta yang setara dengan 1,7% dan dengan system *parliamentary threshold* 2,5% sehingga berakibat hilangnya wakil PBB di DPR RI, meski di beberapa daerah pemilihan beberapa calon anggota DPR RI yang diajukan mendapatkan dukungan suara rakyat dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Anggota DPR RI. Namun PBB masih memiliki sekitar 400 Anggota DPRD.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadhif Muhammad Irsyad
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 1 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Kletek RT: 05 RW: 02 Kec. Pucakwangi
Kab.Pati
Alamat Sekarang : Jl. Honggowongso No. 6 Ngaliyan- Semarang
Nomor Telepon : 085702579501

Pendidikan:

- SDN Kletek 01 Lulus Tahun 2006
- MTs Matholi'ul Huda Pucakwangi Lulus Tahun 2009
- MA Matholi'ul Huda Pucakwangi Lulus Tahun 2012
- Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Angkatan 2012

Pengalaman Organisasi:

- Intra Kampus:
 1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Jinayah Siyasah 2012-2013.
 2. Bendahara Umum Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Periode 2013-2014.
 3. Bendahara Umum Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) UIN Walisongo Semarang Periode 2015-2016.
- Ekstra Kampus :
 1. Pengurus Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Pati (KMPP) Tahun 2013.
 2. Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah dan Hukum Tahun 2013.

3. Pengurus Perhimpunan Mahasiswa Hukum (PERMAHI)
DPC Semarang bidang Advokasi Tahun 2014.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 Juni 2016

Nadhif Muhammad Irsyad
122211012